



RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VI DPRRI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM

- Tahun Sidang : 2020-2021
- Masa Persidangan : III
- Rapat Ke- : ...
- Jenis Rapat : Rapat Kerja
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, Tanggal : Kamis, 21 Januari 2021
- Waktu : 13.30 WIB s.d. selesai
- Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPRRI Gedung Nusantara I
Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Wakil Ketua Komisi VI F-P NASDEM/ (MARTIN Y.
MANURUNG, S.E., M.A.)
- Acara : Pembahasan Mengenai:
1. Kegiatan dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020;
 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sesuai DIPA Tahun Anggaran 2021;
 3. Pelaksanaan Program bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) Tahun Anggaran 2020 dan rencana program.
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi VI DPRRI
- Hadir : A. Anggota DPRRI:
36 dari 54 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
8 dari 12 orang Anggota
 1. Darmadi Durianto
 2. Rieke Diah Pitaloka
 3. ST. Ananta Wahana, S.H.
 4. Sonny T. Danaparamita
 5. I Nyoman Parta, S.H.
 6. Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
 7. Sondang Tiar Debora Tampubolon
 8. dr. H. Mufti A. N. Anam.

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
6 dari 8 orang Anggota
 1. Drs. Mukhtarudin
 2. Ir. H. Moh. Idris Laena
 3. Lamhot Sinaga
 4. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
 5. Trifena M. Tinal, B.S.C.
 6. Nusron Wahid

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)
3 dari 7 orang Anggota
 1. Andre Rosiade
 2. Khilmi
 3. Ir. H. La Tinro LaTunrung

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
4 dari 4 orang Anggota
 1. Nyat Kadir
 2. H. Subardi, S.H., M.H.
 3. Zuristyo Firmadata, S.E., M.M.
 4. Muhammad Rapsel Ali

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
5 dari 5 orang Anggota
 1. Ir. H. M. Nasim Khan
 2. Tommy Kurniawan
 3. Marwan Ja'far
 4. Drs. H. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
 5. Siti Mukaromah, S.Ag., M.A.P.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
4 dari 5 orang Anggota
 1. DR. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
 2. Hj. Melani Leimena Suharli
 3. Putu Supadma Rudana
 4. Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
3 dari 4 orang Anggota
 1. Hj. Nevi Zuairina
 2. Rafli
 3. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
2 dari 5 orang Anggota
 1. Abdul Hakim Bafagih
 2. Primus Yustisio, S.E.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)
1 dari 2 orang Anggota
1. Elly Rachmat Yasin

JALANNYA RAPAT,

KETUA RAPAT / F-P. NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

(Suara Tidak Terdengar)

....serta Komisi VI DPRRI,

Juga selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Saudara Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Teten Masduki beserta jajaran.

Pada pagi hari ini kami berterima kasih, karena Pak Menteri dan jajaran berkenan untuk pindah jam dalam waktu singkat, karena memang kami baru juga dapat pemberitahuan dari pimpinan bahwa pada jam 14 nanti akan Paripurna.

Saya rasa kita semua menganggap atau memandang rapat ini penting untuk kita tetap laksanakan. Sehingga, pada pagi hari ini kita berkumpul di sini, saya rasa enggak usah baca lagi soal aturan-aturan, karena saya lihat memenuhi aturan dan kita semua sudah tahu. Karena kita nanti berakhir pukul 14, maka rapat ini selambat-lambatnya kita bisa akhiri pukul 13.30, sepakat ya.

(RAPAT: SETUJU)

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI DPRRI, rapat kerja hari ini telah dihadiri dan ditandatangani baik secara fisik dan virtual oleh 32 orang Anggota Komisi VI dari 53 totalnya dan fraksi sebanyak 9 fraksi. Sehingga, sesuai dengan tata tertib sudah memenuhi kuorum dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum. Setuju?

(RAPAT TERBUKA)

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.35 WIB)

Sebagaimana kita ketahui dan juga dari rapat yang kita selenggarakan sebelumnya, kita ingin mendengar pertama pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dan rencana kegiatan Tahun Anggaran 2021, juga tentunya pelaksanaan kegiatan Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) Tahun Anggaran 2020 dan rencana pada Tahun Anggaran 2021.

Juga saya rasa dalam forum ini, kita bisa memberi kesempatan juga kepada Pak Menteri untuk bisa menerangkan kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan rapat ini, apa namanya kejadian-kejadian di lapangan ya, ada bupati yang viral dan lain sebagainya, ada juga hoaks ya, temuan-temuan lapangan juga ada saya pikir nanti dari Bapak Ibu Anggota.

Sehingga, kita bisa bersama-sama mengawal program BPUM yang sangat baik ini agar bisa terus semakin baik dan juga pelaksanaan di 2021 bisa *impact*-nya dirasakan secara maksimal oleh seluruh rakyat Indonesia.

Karena itu, tanpa berlama-lama saya persilakan kepada Pak Menteri koperasi dan UKM RI untuk menyampaikan penjelasannya. Silakan, Pak.

MENTERI KOPERASI DAN UKM:

Terima kasih Pimpinan, Pak Martin Manurung.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Syalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan,

Pimpinan, dan

Anggota Komisi VI DPRRI yang kami hormati, dan

Hadirin yang berbahagia.

Kami datang lengkap, Pimpinan. Yang pertama, anggaran tahun 2020. Sebagaimana diketahui, anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020 adalah sebesar Rp972.330.202.000,-. Kemudian, terjadi penghematan sebesar Rp322.565.844.000,- Sehingga, pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM menjadi Rp649.771.358.000,-.

Selanjutnya, pada bulan Agustus Kementerian Koperasi dan UKM mendapatkan alokasi tambahan anggaran yaitu, untuk penyaluran Banpres produktif tahap 1 sebesar Rp22.014.800.650.000,- Pada bulan September, kemudian mendapatkan tambahan anggaran tahap kedua penyaluran Banpres produktif sebesar Rp6.810.033.600.000,- Sehingga, total pagu Kementerian Koperasi dan UKM adalah sebesar Rp29.474.605.608.000,-.

Nah, berdasarkan anggaran, pagu anggaran tersebut telah mampu direalisasikan sebesar Rp29.247.222.697.834,- atau 99,23% dengan sisa anggaran Rp227.382.910.166,- atau 0,77%.

Nah, berikutnya, pagu anggaran tahun 2021 berdasarkan surat Kementerian Keuangan, tanggal 2 Oktober 2020, hasil hal penyampaian maaf pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021 adalah sebesar Rp978.289.099.000,- yang terbagi dalam dua program yaitu, program kewirausahaan, UMKM dan koperasi, serta program dukungan manajemen.

Kementerian Koperasi dan UKM mengalami *refocusing*, penghematan sebesar Rp88.228.724.000,-. Jadi, berdasarkan surat Kementerian Keuangan, maka pagu anggaran 2021 setelah dilakukan *refocusing* adalah sebesar Rp890.060.375.000,-. Nah, selanjutnya, kami ingin sampaikan, kami informasikan juga kepada para Anggota Dewan yang terhormat bahwa telah

dilakukan perubahan struktur organisasi pada Kementerian Koperasi dan UKM.

Sesuai dengan arahan dari Pak Presiden, kami melakukan reformasi birokrasi, penyederhanaan, di mana struktur organisasi lama yang terdiri dari 6 ke deputian dan 2 badan layanan umum dan saat ini menjadi 4 ke deputian dan 2 BLU.

Untuk itu, kami ingin perkenalkan sebagai Deputi Bidang Perkoperasian, Bapak Ahmad Jabadi sebelah kiri. Ini nanti barangkali Bapak Ibu yang mau berurusan dengan koperasi, nanti dengan Pak Ahmad Jabati ini. Lalu, sebagai Deputi Bidang Usaha Mikro, ini Pak Edi Satria. Ini yang paling banyak ngurusin yang mikro mikro, termasuk BPUM yang akan datang ada di Pak Edi Satria.

Lalu, sebagai Deputi Bidang UKM Kecil Menengah, Bapak Hanung Hariba, ini nanti. Lalu, Deputi Bidang Kewirausahaan, nah ini Ibu Victoria. Ini nanti fokusnya untuk melahirkan wirausaha-wirausaha baru. Ya, jadi ini kita mau menambah jumlah persentase wirausaha kita yang saat ini kita baru 3,47%, sementara untuk menjadi negara maju kita harus minimum 4%. Jadi, nanti kita akan lebih fokus.

Adapun Direktur Utama pada LPDB masih tetap dipegang Pak Soepomo, virtual. Lalu, Direktur LLP KUKM, Smeskop Bapak Leonal Hanu Subrata, Leo Subrata, serta untuk Sekretaris Kementerian ini ada perubahan pejabat dari Bapak Rully Indrawan yang purna tugas digantikan oleh Bapak Arif Rahman Hakim. Nanti, saya kira Pak Arif sudah banyak kenalan dengan DPR, nanti Bapak Ibu sekalian silakan komunikasi dengan kami langsung dengan Pak Arif Rahman. Ini, Pak. Beliau sebelum di Kementerian, Sekretaris Sekjen KPU, Sekjen KPU, sebelumnya di Bappenas.

Pimpinan, dan

Anggota VI DPRRI yang kami hormati, dan

Hadirin yang berbahagia.

Arah fokus program kegiatan tahun 2021, yang pertama adalah bidang perkoperasian dengan *outcome* terwujudnya koperasi modern ya. Yaitu, pengembangan modal, pengembangan modal.

1. Pengembangan model bisnis koperasi dan fasilitasi pemanfaatan teknologi melalui digitalisasi koperasi.
2. Pembiayaan dan penjaminan koperasi melalui skema atau sistem permodalan.
3. Penetapan *good corporate governance* dan koperasi melalui sistem pengawasan terpadu.
4. Pengembangan SDM perkoperasian dan jabatan fungsional.

Berikutnya bidang usaha mikro dengan *outcome* terwujudnya usaha mikro yang naik kelas.

1. Pembiayaan usaha mikro melalui fasilitasi penguatan permodalan.
2. Kemudahan izin dan perlindungan di area infrastruktur publik.

3. Pengembangan rantai pasok usaha mikro melalui standarisasi dan skema sistem atau skema atau sistem jaringan pemasaran.
4. Pengembangan kapasitas usaha melalui transformasi informal menuju formal.

Kita tahu sebagian besar usaha mikro masih bersifat informal. Lalu, bidang usaha kecil dan menengah dengan *outcome* terwujudnya kontribusi ekspor usaha kecil dan menengah. Yang pertama adalah pengembangan investasi dan UKM melalui skema atau sistem pembiayaan dan potensi investasi. Kedua, pengembangan SDM UKM melalui fasilitasi pelatihan dan pendampingan serta pengembangan kawasan atau klaster UMKM berbasis sektor. Tiga, pengembangan kawasan dan rantai pasok UMKM berbasis tematik potensi kewilayahan. Empat, kemitraan dan perluasan akses pasar melalui *scaling-up* produk UMKM.

Berikutnya bidang kewirausahaan dengan peningkatan rasio kewirausahaan tadi. Saat ini kita baru 3,47%. Kegiatan yang dilakukan adalah kita akan memberikan:

1. Konsultasi bisnis dan layanan pendampingan usaha.
2. Pengembangan teknologi informasi dan inkubasi melalui, inkubasi usaha melalui fasilitasi.
3. Pengembangan ekosistem bisnis melalui kerja sama dunia usaha dan dunia industri, serta perguruan tinggi.
4. Pembiayaan wirausaha melalui perluasan akses pembiayaan dan fasilitasi permodalan.

Lima, berikutnya maaf. Lembaga Pengelola Dana Bergulir LPDB. Nah, penyaluran dana bergulir bagi koperasi diarahkan ke sektor *real*, ke sektor produksi terutama di sektor pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, perkebunan dan UKM strategi sebagaimana arahan presiden. Kita perlu memperkuat pangan dan terintegrasi dengan program perhutanan sosial. Lalu berikutnya, lembaga layanan pemasaran. Ini nanti akan ada peningkatan kapasitas Smesco dalam layanan pemasaran dan perdagangan lokal, regional dan internasional. Pengembangan Smesco *hub* untuk Indonesia bagian timur dan ketiga, pelatihan dan pengembangan program cepat. Jadi, kami dengan dua sayap LPDB untuk pembiayaan, kementerian untuk pengembangan, lalu yang Smesco untuk sayap bisnisnya, promosi untuk mendorong meningkatnya omset UMKM.

Nah, berikut yang ingin kami jelaskan juga adalah pelaksanaan Banpres produktif untuk pelaku usaha mikro pada tahun 2020. Perlu diketahui tersalurkan kepada 12 juta usaha mikro 100% dengan nilai anggaran 28,8 triliun. Namun, hingga saat ini, belum seluruhnya tersalurkan oleh bank penyalur. Hal ini karena disebabkan adanya pembatasan sosial. Jadi, ini ada kendala ya. Oleh karena itu, kami sudah mengajukan pertimbangan kepada Kementerian Keuangan agar diberikan kelonggaran pencairan hingga 31 Januari 2021. Nah, kami ingin mengerti beberapa hasil survei *monitoring* tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan TNP2K di sekretariat, sekretariat Wakil Presiden RI dan Kementerian Koperasi UMKM dengan jumlah responden sekitar 1.261 orang. Mayoritas sebesar 88,5% memanfaatkan dana untuk kegiatan produktif, terutama untuk pembelian

bahan baku dan 69% sudah mencairkan serta 31% belum mencairkan, kendala masih dalam proses aktivasi dan belum memiliki waktu pencairan.

Nah, karena si penerima harus dipanggil oleh bank penyalur, harus menandatangani apa surat pertanggungjawaban mutlak. Jadi, ini yang kemudian dengan pendekatan apa dengan kebijakan pembatasan sosial ini agak terhambat. Lalu, sumber data 12 juta pelaku usaha mikro diusulkan oleh BLU ya, ada PNM dari BUMN sebanyak 5,4 juta. Dinas yang membidangi koperasi dan UKM di provinsi atau daerah istimewa, kabupaten dan kota sebanyak 5,2 juta. Perbankan sebanyak, dalam hal ini 868.000, koperasi sebanyak 294.000 dan kementerian atau lembaga 132.000.

Nah, pengusul ini sudah diatur di dalam Permenkop dan sudah disetujui waktu itu semua skema ini oleh komite PEN. Nah, berikutnya survei BRI membuktikan terhadap pemanfaatan dana Banpres produktif untuk usaha pelaku mikro ini menunjukkan sebesar 75,4% dimanfaatkan untuk membeli bahan baku atau bibit, barang dapur, saya kira hampir sama tadi dengan survei TMP2K hasilnya. Lalu, sebesar 4,4 44,8% responden UKM masih beroperasi karena meningkat usahanya setelah menerima Banpres produktif ini dan sebesar 51,5% responden UMKM yang tertutup sementara menjadi beroperasi kembali. Jadi, kami simpulkan program ini sangat dibutuhkan meskipun masih ada kelemahan-kelemahan.

Yang ketiga, rencana program Banpres produktif usaha mikro tahun 2021. Kementerian Koperasi dan UKM telah berkirim surat kepada Kementerian Keuangan tanggal 14 Desember 2020. Usulannya adalah lanjutan yaitu, usulan lanjutan program Banpres produktif pelaku usaha mikro Tahun Anggaran 2021, usulan penambahan anggaran sebesar 28 triliun 800 miliar rupiah dengan target 12 juta usaha mikro yang akan diberikan dana bantuan langsung sebesar 2,4 juta.

Nah, penyaluran Banpres BPUM akan diprioritaskan dari aspek pemerataan antar daerah dan yang belum menerima bantuan Banpres dan bagi yang sudah mendapatkan bantuan Banpres atau bantuan BPUM akan diarahkan untuk mengakses pembiayaan kredit usaha mikro. Saat ini yang mengajukan kami ada 28, 38 juta ya. Jadi, memang masih banyak usaha mikro yang belum menerima pada tahap pertama. Karena itu, kami sudah membicarakan dengan komite PEN agar yang 2021 diprioritaskan untuk usaha mikro yang belum menerima dan yang sudah menerima diarahkan untuk menerima Kur Supermikro yang saat ini sudah ditetapkan bunganya 3% ya dan dengan begitu diharapkan dengan kebijakan ini, selain kita membantu pembiayaan untuk modal usaha, usaha mikro, tapi juga kita menghubungkan usaha mikro ke akses perbankan. Sehingga dengan begitu maka, dari yang *unbankable* menjadi *bankable*.

Nah, kami sangat berharap Pimpinan dan para Anggota Komisi VI DPRRI untuk mendukung program ini, termasuk dukungan di lapangan. Kami sekarang sedang dalam tahap penyempurnaan sistem. Kami akan membicarakan hal ini dengan BPK, BPKP dan juga KPK. Sekiranya kalau Bapak Ibu sekalian yang saya kira banyak memiliki informasi di lapangan, kami dengan senang hati untuk menerima masukan-masukan dan saran-saran.

Terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Santi Santi Om.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Menteri atas paparannya.

Selanjutnya, saya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Anggota untuk memberikan pendalaman. Saya persilahkan yang paling semangat, Evita.

ANGGOTA:

Daftar ya.

ANGGOTA:

Ketua, daftar ketua.

ANGGOTA:

Daftar ketua.

ANGGOTA:

Daftar, daftar.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Deddy Sitorus, Ketua.

KETUA RAPAT:

Tolong didaftar di-*chat*, Pak. Biar bisa dicatat. Silakan, Mba Evita.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Terima kasih.

Bapak Pimpinan,

Bapak Menteri dan jajaran yang saya hormati,

Selamat kepada para Eselon yang baru diangkat. Pak Dirjennya baru semua nih ya, kecuali Pak Hanung agak lama ya. Oh, geser geser aja nih, oh gitu.

Pak, terima kasih atas paparannya yang diberikan. Saya mau melihat halaman dua dulu, Pak. Di halaman dua ini Pak (***suara tidak jelas***) itu disebutkan ada 227 miliar atau 0, (***suara tidak jelas***) total anggaran yang (***suara tidak jelas***) triliun menjadi 29 triliun karena Bapak dapat Banpres, kan begitu Pak. Ini sisa anggarannya kan 227 miliar setelah Banpres. Saya pengen tahu sebenarnya Pak, sebelum Banpres itu berapa sih kondisinya, laporannya seperti apa gitu. Sisa anggarannya seperti apa.

Kemudian halaman 3 Pak, yang tadi apa namanya kita apresiasi ya bahwa Pak Menteri tadi mempresentasikan mengenai terwujudnya kontribusi *ekspor* UMKM, ya Pak ya. Tentu di sini yang paling penting adalah bagaimana mencari, membuka jaringan partner kita di luar negeri kan begitu Pak. Itu menjadi tugasnya Kementerian Koperasi nih, ya kan kalau udah dibuka jaringannya, ya kan itu nanti tentu UMKM-nya yang akan aktif, beraktifitas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah ini, Pak. Jadi, simpul *network* ini Pak yang harus menjadi target daripada Kementerian UMKM ke depan Pak untuk mencari apa namanya membantu para UMKM untuk yang ekspor, kontribusi ekspor ke UMKM ini dan tentunya selain kita membuka simpul *network* itu, kita juga harus mencari UMKM-UMKM apa ya kan. Nah, ini kita harus yang berpotensi untuk untuk apa namanya untuk memperkuat yang namanya kontribusi-kontribusi daripada ekspor UMKM kita. Jadi ini, harus dibidik kan Pak, daerah-daerah ini yang mana saja. Nah, ini saya harap ini apa koperasi, Kementerian Koperasi bisa mempunyai apa namanya fokus terhadap ini.

Saya yang masih kurang mengerti itu sebenarnya di halaman 4, Pak. Ini kan ada survei BRI di sini Pak, ya kan. Di situ dikatakan bahwa penerima Banpres produktif itu dari total 3.000 sekian itu sebenarnya 2.000 sekian masih beroperasi mereka itu, ya Pak ya. Kemudian, dia kan masih beroperasi mereka di sini. Kemudian, berarti *alhamdulillah* cukup, cukup banyak juga nih yang belum, ya kan. Jadi, tapi katanya dari survei ini setelah diberikan bantuan Banpres 51% itu dibuka kembali. Ya berarti kan, bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat, Pak. Jadi kita, kita apresiasi terhadap data ini apabila ini benar ya, Pak ya. Namun demikian, saya nggak ngerti dari data ini kok ada perbedaan Pak Menteri dengan data yang saya terima di lapangan, kan begitu Pak Menteri. Jadi, kita ini kan Anggota DPRRI ini punya media sosial, ya Pak ya. Media sosial yang mana kita menampung aspirasi masyarakat itu melalui media sosial yang ada. Keluhan-keluhan terhadap apa namanya bantuan UMKM modal usaha ini, ini masih banyak sekali yang kita terima, Pak Menteri ya kan. Sebenarnya, saya mau tanya sama Pak Menteri 1 dulu sebelum melanjutkan pertanyaan saya. Ini bantuan Banpres ini tujuannya apa, Pak? Stimulus bukan? Tolong dijawab itu dulu, Pak. Ini stimulus atau bukan?

MENTERI KOPERASI DAN UKM:

Iya, ini sudah ini kan BPUM ini kan kebijakan PEN, ya Bu Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan kami menjalankan program ini.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Iya.

MENTERI KOPERASI DAN UKM:

Dan memang ini ditujukan memang untuk memberikan stimulus.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Oke, itu aja Pak yang saya perlu tahu.

Nah, ketika kita bicara ini tujuan dasarnya adalah stimulus, seharusnya penerimaan itu tidak dipersulit, kan begitu Pak. Ketika tujuannya stimulus. Karena begini, Pak. *Wong* rakyat kecil ini udah nggak mampu, dipersulit. Kita *bellout* itu konglomerat-konglomerat yang yang memanipulasi uang rakyat triliunan, gitu loh. Kok rakyat kita cuma 2,4 juta aja dipersulit gitu Pak. Pandemi ini berapa banyak yang kita *baillout*, ya kan.

Jiwasraya kita *baillout*, nah rakyat kita ketika mendapatkan bantuan modal, itu masih dipersulit. Kemarin, ketika rapat dengan Kementerian BUMN, dengan Pak Erick Thohir, saya sudah angkat isu ini. Saya minta lintas departemen, lintas kementerian juga berkoordinasi, ya Pak ya. Kenapa saya angkat begini, lucu kalau saya bilang ya. Misalnya nih, orang mempunyai utang di BRI dia nggak dapat lagi Banpres. Loh, yang namanya pedagang, pengusaha itu ada utang, Pak. Justru kan supaya bantuan ini supaya usahanya ini tetap jalan, kan tujuannya itu. Terus ketika orang punya cicilan motor, bantuan ini tidak turun. Yang namanya pedagang, Pak keliling, itu pakai motor, itu pasti dia cicil motornya, Pak. Tetapi, untuk membeli barang-barang yang akan dijual, dia enggak punya modal.

Jadi, saya melihat ini kok pemerintah di satu sisi membuat kebijakan, maksudnya membantu tetapi mempersulit juga, gitu Pak Menteri. Ya kan, tolong deh di apa namanya dipikirkan dalam hal ini dievaluasi. Di Amerika itu jelas, Pak. Dia cetak uang, dia edarkan per kepala dapat sekian ribu dollar, kan begitu Pak. Tujuannya apa, kita lagi-lagi stimulus, supaya perekonomian kita bergerak. Ada daya beli di tengah-tengah masyarakat kita, kan itu tujuannya Pak, sebenarnya stimulus ini.

Nah, kenapa musti dipersulit, kenapa kasih bantuan *baillout* konglomerat-konglomerat yang sudah merampok uang rakyat itu, itu begitu mudah, gitu Pak. Nah, ini coba di dipikirkan untuk dalam hal-hal seperti ini begitu pak. Apanya? Ya kita *bellin*, kita juga meminta kepada Pak Menteri ya kan, itu kan keputusan politis ya kan ada ininya. Tetapi, itu dipentingkan untuk yang namanya ekonomi makro kita perlu lakukan itu, ya kan. Itu ada dua sisi yang berbeda kepentingannya, tetapi rakyat kita juga jangan dipersulit di dalam meminta bantuan.

Ini saya dengar lagi nih Pak Menteri, nggak tahu bener atau nggak nih. Ketika dia sudah mendapatkan KUR, ya Pak ya, dia nggak bisa dapat lagi namanya bantuan Banpres, bener ga Pak? Tapi, ketika dia sudah dapat Banpres, bisa dapat bantuan KUR. Nah, ini loh Pak yang maksud saya, yang yang begini-begini loh. Padahal, KUR itu kan cuman batasnya 10 juta, kan

begitu Pak pinjam ininya pinjamannya. Jadi maksud saya, yang hal-hal seperti ini Pak. Jadi maksudnya itu, mau membantu orang supaya dia bisa berjalan, tapi sebelah kakinya diikat gitu loh Pak. Nah, ini tolonglah di apa namanya dievaluasi hal-hal seperti ini.

Kemudian, satu lagi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Ketika itu, Menteri Keuangan saya baca nih Pak, tertundanya yang LPS, Lembaga Penjaminan Koperasi, itu karena menurut Kementerian Keuangan itu memakan waktu, ya kan, untuk untuk aturan-aturan dan lain-lainnya. Nah, ini makanya dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. Nah, sekarang sudah sampai mana upaya dari Kementerian Koperasi untuk Lembaga Penjaminan Koperasi ini Pak, ya kan. Karena, ini dari Undang-Undang Cipta Kerja disahkan ini kan sudah beberapa bulan ke depannya, Pak Pak Menteri gitu loh. Ini juga hal-hal yang ingin, karena terus terang saja tujuan daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini kan untuk membuka lapangan kerja, kan begitu Pak. Jangan sampai ini cuman *lips service* aja gitu loh, kejadian di lapangannya tidak terjadi seperti itu. Nah, ini yang jadi apa yang sudah diundang undangkan dengan implementasi di lapangan, saya minta agar itu dicocokkan.

Kemudian Pak, ini mengenai UMKM bantuan UMKM ini Pak. Tolong Pak diini kan. Kita ini malu loh sama dapil kita masing-masing. Ini kan bukan bukan hal yang tertutup sebenarnya ketika kita mengusulkan apa namanya nama-nama daripada bantuan UMKM, aspirasi dari masyarakat kita gitu. Tetapi Pak, kita malu turun ke dapil sekarang, Pak.

Nggak jelas juntrungannya gitu. Kita minta laporan ke Kementerian Koperasi, nggak dapat ya kan. Sebenarnya ini gimana gitu, ya kan. Kita di diminta tolong siapa yang membutuhkan di dapil kita, kita sudah berikan nama, sudah belikan ini, tapi kita cuman ini belum terima ini belum terima, minta data, maaf memang sibuk, tadi saya sudah mendengar penjelasan dari Pak Hanung, ya kan. Data itu nggak bisa karena keterbatasan staf Pak Menteri ya kan dalam pendataan. Tolonglah, dibayar itu anak-anak sekolah kalau cuman untuk data itu, Pak. Data itu kan bisa *work from home* sebenarnya gitu, nggak nggak harus ada di tempat Pak Menteri. Jadi, alasan untuk kekurangan orang apa segala macam menurut saya di era sekarang teknologi ini, ini tidak bisa diterima alasan tersebut Pak Menteri.

Saya rasa demikian, Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Makasih.

Jadi, kita masih di kiri dulu. Cuman kita aturlah pembicaraan kita supaya singkat, karena kita nanti mau rapat paripurna. Pak Tommy.

F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):

Terima kasih, Pimpinan.

Tadi saya mintanya terakhir tapi dapat duluan *Alhamdulillah*.

Terima kasih.

Pimpinan yang saya hormati,

Rekan-rekan Komisi VI,

Pak Menteri Koperasi dan UMKM yang saya hormati beserta dengan seluruh jajaran.

Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali di tahun 2021 tahun yang saya kira harus penuh dengan optimisme, karena kita masih berhadapan dengan pandemi yang belum selesai. Tentu dari pemaparan Pak Menteri, saya apresiasi apa yang telah disampaikan. Apalagi penyerapan anggaran ini luar biasa sekali, rata-rata di atas 90% tentu patut kita apresiasi. Mudah-mudahan ke depannya kinerja dari Kementerian Koperasi dan UMKM bisa jauh lebih baik lagi, Pak.

Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan pada saat dulu kita rapat tahun lalu, Pak. Pak Menteri mengatakan ada 5 program strategis yang akan diimplementasikan ke depan, yaitu pengembangan dan perluasan akses pasar, peningkatan daya saing dan kapasitas produk dan jasa UMKM, pembiayaan dan investasi yang mudah, pengembangan kapasitas manajemen usaha, serta pengembangan kemudahan iklim usaha dan kesempatan berusaha. Nah, dari 5 program prioritas ini dalam penyerapan anggaran yang telah disampaikan oleh Pak Menteri, saya kira perlu ada penjelasannya. Kira-kira dari 5 program prioritas itu sudah sampai mana capaiannya. Apakah ada kendala atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa UMKM itu memiliki kendala utama selain modal adalah manajemen. Tadi di program 5 prioritas itu, ada dalam yang disampaikan oleh Pak Menteri. Saya kira di 2021 ini juga perlu Pak untuk bisa ditekankan dalam hal manajemen UMKM.

Kemudian yang berikutnya yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana transformasi teknologi produksi supaya UMKM memiliki daya saing. Saat ini kan, sudah terlalu banyak market dalam negeri yang diserang oleh produk-produk impor lewat *e-commerce*. Kalau IKM mau bersaing, maka harus ada standarisasi global. Nah, bagaimana cara Kemenkop mensinergikan hal ini.

Kemudian, pada tahun 2020 Kemenkop UKM juga mendorong inisiatif dengan membangun rumah produksi bersama, Pak. Tujuannya agar UMKM bisa terus produksi secara bersama-sama, meski tidak memiliki pabrik sendiri. Ini kan program yang sangat bagus dan baik secara bersama-sama. Nah, bagaimana implementasi dalam hal ini, apakah benar-benar berjalan atau tidak saya mohon bisa diberitahu kepada kami progresnya.

Kemudian berikutnya yang saya ingin tanyakan, Pak Menteri. Dalam masa reses kemarin, saya bertemu dengan salah satu koperasi di dapil saya. Kemudian mereka bertanya kepada saya mengenai masalah rekomendasi distribusi gula rafinasi. Saya waktu itu agak sedikit bingung, karena belum mengetahui. Setelah saya cari-cari peraturan yang ternyata tahun 2019 itu Kementerian Perdagangan mengeluarkan aturan mengenai distribusi gula rafinasi, tujuannya untuk membantu IKM-UKM kecil atau UKM kecil agar mendapatkan apa namanya gula rafinasi tersebut dan juga menghindari

kebocoran-kebocoran. Ini saya kira peraturan yang sangat bagus, Pak Menteri. Saya ingin memberikan sedikit masukan saja dalam rekomendasinya bahwa kalau saat ini koperasi nasional masih bila, masih bisa mempunyai anggota di berbagai macam daerah. Artinya, kalau seperti itu kan tujuannya tidak dapat, Pak Menteri. Maksud saya rekomendasinya adalah per masing-masing wilayah saja gitu, di kota-kota kabupaten saja. Jadi, jangan misalkan koperasi di Jakarta, tapi bisa ke mana-mana. Akhirnya, tujuan utama dari peraturan ini agar merata distribusinya itu tidak tercapai. Saya kira perlu dipertimbangkan, Pak Menteri. Karena, Kementerian Koperasi dan UMKM dalam hal ini telah memberikan rekomendasi kepada koperasi-koperasi yang menyalurkan.

Saya kira itu terkait dengan BPUM, program yang sangat berguna sekali, program yang sangat bermanfaat sekali. *Alhamdulillah* banyak masyarakat yang menurut saya terbantu, salah satunya adalah di dapil saya pedagang dodol di Tenjo, Pak. Satu hari dia produksi 3 juta, dapat bantuan 2,4 juta sempat terhenti. *Alhamdulillah* sampai sekarang bisa berjalan lagi. Jadi, saya sangat apresiasi. Mudah-mudahan sistemnya ke depan lebih baik lagi Pak, karena rekomendasi dari Anggota DPR juga warga negara Indonesia, yang sama-sama haknya dilindungi oleh hukum di negara ini.

Terima kasih. Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Kita ke sayap kanan, Pak Nyoman Parta.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

**Pimpinan beserta seluruh Anggota Dewan yang saya hormati,
Pak Menteri serta jajaran,**

Saya ingin membatasi diri hanya bicara urusan BPUM, karena waktu dan juga banyak sekali kawan-kawan akan berbicara. Saya mengamini Pak Menteri bahwa memang program yang satu ini benar-benar bermanfaat. Jadi, setuju saya dengan hasil surveinya itu dan memang sebagian besar fokus pada penambahan bahan baku yang sebelumnya, karena pandemi mereka tidak sanggup penuhi. Karena saya sering di lapangan, saya ingin memberikan evaluasi untuk perbaikan ke depan sekaligus nanti ada usul yang kami ingin sampaikan.

Yang pertama, sering muncul nama-nama yang berbeda di antara yang di-*sms* dengan nama aslinya, sehingga ini banyak sekali menimbulkan kendala di lapangan. Ada nama yang berbeda, ternyata orangnya di luar kota dan dananya sudah dicairkan. Jadi, ketika datang ke BRI ternyata sudah diambil oleh orang lain. Ini harus dicermati di lapangan, Pak. Terus mungkin tidak semua yang *mengupdate* nomor digit KTP-nya, masih mengusulkan nomor KTP yang 14 digit. Sementara diharuskan 14, 16 digit. Ketika namanya

muncul, itu tidak bisa direalisasi juga Pak Menteri. Mungkin, memang harus dibuat standar khusus untuk itu. Terus, ada juga yang muncul namanya, nomor satu sini. Munculnya tanggal 16, tanggal 25 Desember ketika diurus tanggal 4, sudah hilang dari sistem. Yang seperti itu terjadi di lapangan. Begitu juga antar bank, karena ini satu Bank BRI. Di bank cabang tertentu dia dananya cair sekali 2,4, tapi ada juga bank yang sama lokasinya berbeda cairnya tiga kali. Nah, ini mungkin harus dibuat standar memang 4-3 kali kah pencairannya atautkah memang satu kali ini dibuat agar lebih seragam.

Selanjutnya, masukkan saya Pak Menteri terhadap penyempurnaan program ini ke depan, apalagi sudah disebutkan tadi ke depan akan mengusulkan pagunya sekitar sama juga dengan yang tahap pertama, 28 triliun dana yang cukup besar dan pasti akan sangat membantu. Yang pertama, saya ingin menyampaikan untuk pengusulannya, untuk pengusulannya diluar lembaga-lembaga yang disebutkan mungkin lebih bisa difokuskan ke dinas-dinas koperasi atau dengan lembaga lain, tetapi ketentuannya adalah keterangan usahanya yang penting, Pak. Jadi, keterangan usaha yang didapatkan dari kepala desa itu justru yang paling penting, karena dari situ *screening*-nya bahwa yang bersangkutan memang benar memiliki usaha.

Jadi, usulannya seperti itu. Sebab, di lapangan terutama sekali yang tahap awal, ada yang diusulkan oleh BRI oleh bank, ada yang diusulkan oleh Pegadaian juga langsung, mungkin juga oleh koperasi. Banyak juga yang memiliki KUR, cair Pak. Karena, logikanya BRI dengan terutama sekali BRI, itu pasti data-data yang meminjam KUR yang disampaikan yang usulannya itu, sehingga banyak yang justru cair, tapi tahap berikutnya yang punya KUR tidak boleh cair bahkan sudah dapat SMS, ternyata ketika dicek tidak boleh cair. Ini mungkin perlu dibenahi lapangannya. Menurut saya, karena memang KUR itu adalah pinjaman, sementara Banpres adalah bantuan, menurut saya tidak ada masalah mereka dapat di awal, tetapi bukan untuk berturut-turut, bukan untuk berturut-turut.

Selanjutnya Pak Menteri, saya mengusulkan agar khusus untuk memberikan perhatian juga pada disabilitas. Karena, selama ini mereka yang bekerja di sebagai tukang pijat, penyanyi di pinggir jalan, maupun bentuk-bentuk kegiatan lain yang mereka lakukan secara mandiri, itu banyak sekali mengalami dampak. Mungkin, memang perlu dibuatkan khusus pendataan khusus agar diberikan bantuan agar mereka bisa beraktifitas. Lebih lanjut Pak Menteri, KUR kan dulu ketika normal diberikan dengan bunga 6%. Suasannya normal, Pak Menteri. Apa tidak bisa dibuat kebijakan baru khusus masa pandemi ini, karena kendala bahan bakunya semua naik terutama sekali kuliner, daging semuanya naik, telur naik, cabe bahkan luar biasa. Agar mereka tidak berusaha akhirnya hanya untuk bayar bunga, apa tidak bisa KUR itu diturunkan dari 6 menjadi 3 gitu misalnya. Jadi di, sudah?

MENTERI KOPERASI DAN UKM:

Sudah. Sudah di sekarang sudah jadi kebijakan.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Wah, luar biasa Pak Menteri.

MENTERI KOPERASI DAN UKM:

Yang tahun lalu yang 0 supermicro 10 juta 0%, Pak.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Iya, tapi cuma 2 bulan. Tidak tidak tidak hanya, iya.

Lebih lanjut yang terakhir, mohon izin.

Pimpinan.

Bapak Ibu,

Pak Dammer juga,

Khusus untuk Bali, Pak Menteri. Jadi, Pak Menteri barangkali sudah beberapa kali juga berkunjung ke Bali. Ini benar-benar situasinya kontraksinya luar biasa, dua kali lipat dengan situasi nasional. Sepi betul, Pak Menteri. Saya mohon ini diberikan perhatian khusus oleh Pak Menteri baik bagaimana membangkitkan Bali agar bisa seperti semula lagi. Saya juga melihat di Kuta misalnya, ada ada per kapan ya Pak Nyoman turis akan datang. Tapi, ada juga teman-teman para turis ingin bertanya kapan ya Kuta akan dibuka. Nah, siapa yang mempertemukan ini. Saya pikir harus ada keterlibatan kementerian untuk mempertemukan ini. Karena, sudah paling tunggu mereka ingin datang dan ini sudah siap untuk buka. Harus ada yang mempertemukan ini agar apa namanya kepentingan ini bisa ketemu dan dan ekonomi Bali bisa bangkit kembali.

Kira-kira begitu, Pak Menteri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih Pak Nyoman Parta. Supaya Bali *United* lanjut ke Pak Putu.

F-PD (PUTU SUPADMA RUDANA, M.B.A.):

Wah, terima kasih Pimpinan yang ganteng dan luar biasa. Ada Pak Martin dan Pak Demmer di depan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu,

Terima kasih.

Pak Pimpinan, dan

Bapak Menteri, dan

Jajaran yang kita hormati dan banggakan.

Tentu pertama dan utama, saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Memang banyak harapan, banyak cita-cita, banyak keinginan dan banyak juga tentu apa namanya harapan besar kepada pemerintah untuk bisa men-*support* berbagai hal khususnya UMKM kita.

Pertama, saya tentu mengapresiasi Bapak karena serapan anggarannya cukup baik dan tentunya ini menjadi hal utama dan mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi UMKM kita yang dibantu, Pak. Karena pandemi ini tidak hanya di 2020, tapi dampaknya cukup Ppanjang. Kalau kita bicara vaksin, kemarin kami rapat juga dengan Biofarma dan BUMN mengatakan minimal 15 bulan. Tapi, tentu itu tidak bisa karena kita melihat ketersediaannya belum *fix* sampai saat ini nah tentu ini menjadi hal utama bantuan-bantuan kepada UMKM kita.

Pertanyaan saya Pak, mengenai sinergi menyambung Pak Parta dan juga Pak Tommy tadi. Konsep sinergi-sinergi Bapak. Kita tahu UMKM kita memiliki keterbatasan tentang standarnya, Pak. Bagaimana sinergi Bapak dengan BSN untuk mengawal UMKM kita agar standar produk dan produksinya juga mampu bersaing secara nasional dan akhirnya mampu menembus pasar internasional, Pak. Karena, Kementerian Koperasi dan UKM ini kalau saya lihat harus sinerginya banyak, Pak kira-kira begitu.

Sejauh mana dengan BSN. Selanjutnya juga, sejauh mana dengan KPPU, Pak. Karena, ini untuk memproteksi UMKM kita agar betul-betul jangan sampai di apa namanya dibunuh atau dihabiskan oleh pengusaha-pengusaha besar ini, Pak. Jadi, tentu itu harus dikawal betul, karena harus apa. Karena, harus pro-aktif. Tentu kita mengapresiasi Pak Andre ya yang telah bagaimana selama ini memperjuangkan agar produk luar tidak masuk ke Indonesia terlalu banyak importir. Tapi tentu, ini harus dikawal. Bapak harus punya 1 *roadmap*, konsep ke depan untuk mengawal dan menghadirkan UMKM kita dan mungkin sinerginya dengan KPPU.

Selanjutnya. Tadi Pak Parta juga sampaikan sejauh mana Bapak juga duduk dan bersinergi dengan Kementerian Pariwisata, Pak. Karena, yang paling terpukul dan yang paling terpuruk adalah industri pariwisata kita. Di dalamnya pasti ada pelaku pariwisata, di dalamnya pasti ada UKM dan UMKM, Pak dan mereka juga tidak bisa menunggu lagi, sudah hampir setahun ini terjadi. Jadi, kami harapkan BPUM tadi juga ada prioritas khusus kepada pelaku UMKM di sektor ini, Pak. Karena, sektornya sangat parah. Tadi betul kontraksi di Bali *double* digit dan parah sekali dan memang sangat miris kondisi itu, tentu langkah-langkah dari Bapak tentu kami tunggu untuk bisa merealisasikan hal tersebut.

Nah, yang utama juga Pak. Ini kita sangat mendukung BPUM itu tentu dan memang Bapak sampaikan tadi sampai akan diproses sampai 31 Januari 2021, Pak. Nah, tentu masyarakat menunggu Pak. Kita tidak mau hanya janji-janji yang selalu mundur-mundur *on going process*, tapi akhirnya pada akhirnya tidak terealisasi, tidak terealisasikan dan ujung-ujungnya yang dirugikan masyarakat kita yang sangat membutuhkan. Dulu kami pernah mendengar bahwa kementerian, mari usulkan tambahan bagaimana

menambahkan. Jika yang sebelumnya saja belum keluar SK-nya, belum terealisasi Pak. Nah, tentu ini kami perlu agar mungkin mendorong Bapak, agar betul-betul bisa segera merealisasikan hal ini, BPUM ini dan masyarakat jangan sampai menunggu, UMKM jangan sampai menunggu, karena memang mereka-mereka sangat membutuhkan. Dulu saya pernah bilang Bapak Teten ini pasti paten dengan programnya. Tapi, kayaknya kurang paten. Mudah-mudahan ke depan betul-betul paten dan tahun depan akan lebih banyak lagi UMKM kita yang mendapatkan bantuan BPUM ini.

Dan satu hal yang terakhir Pak, karena memang sekarang eranya *e-commerce*, eranya *online marketplace*. Apa kemudian Bapak punya ide untuk membuat UM, membuat UMKM kita satu *e-commerce* atau *online marketplace*, satu terobosan baru. Sehingga, semua etalase, database dan akhirnya ujung-ujungnya produk UMKM kita ternarasikan dengan baik dari Papua hingga Aceh di *e-marketplace* yang memang Bapak konsep kan itu.

Kira-kira itu, Pak. Terima kasih, Pimpinan. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru 2021.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Putu.

Sekarang ke virtual dulu, Pak Deddy Sitorus.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat siang,

Salam sejahtera,

Om Swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan.

Pak Menteri yang saya hormati, terus terang saya sudah menyampaikan langsung sebenarnya ke Pak Menteri betapa saya kecewa dengan usulan kita yang kemarin. Karena, sama seperti yang disampaikan oleh Bu Evita. Sekarang, kita kehilangan kehormatan kalau turun ke dapil, Pak malu kita. Jadi, tolong kita dibantu Pak, dibantu dengan mohonlah karena itu ada nama semua, ya sama seperti kalau orang mengusulkan kartu kredit pak ada surat penolakan, Pak. Jadi, mohon kami agar sudah Kementerian Koperasi mengirimkan surat apa yang membuat mereka ditolak, sehingga kami bisa membantu menjelaskan, Pak.

Supaya jangan kami apa namanya dipermalukan di dapil, maksud hati membantu Pak yang ada kita kehilangan kehormatan. Kalau bisa ini Pak diberikan surat kepada mereka, alasan penolakannya. Sehingga jelas, bukan karena kita tidak memperjuangkan nasib mereka ya. Karena, terus terang kan data itu juga kita sampaikan lewat rekomendasi dari dinas-dinas di masing

kabupaten dan kota. Nah, itu jadi saya juga masih menunggu keterangan dari Pak Deputi yang katanya berjanji akan memberikan alasan penolakan dari usulan-usulan kita. Karena, terus terang maksud kita kan membantu pemerintah Pak, bukan yang lain-lain.

Nah, menyangkut itu saya ingin bertanya, karena tadi saya dengar penjelasannya bahwa akan diusulkan kembali di tahun 2021. Sementara, tadi ada banyak kendala yang kita sudah dengar dari forum rapat ini. Pertanyaan saya, apakah kendala-kendala yang teridentifikasi itu sudah diperbaiki atau sudah ada terobosan-terobosan untuk mencegah hal-hal seperti itu terjadi kembali ya.

Yang kedua, saya ingin tanyakan dari penjelasan yang disampaikan dari file apa namanya penjelasan Pak Menteri tadi, itu ada banyak pihak yang sebenarnya ikut apa namanya menyalurkan BPUM ini, Pak. Yang kita ingin tanyakan, yang saya ingin tanyakan adalah sumber data mereka dari mana, Pak.

Dari bank tadi dan sebagainya itu sumber datanya mereka dari mana dapatnya. Apakah mereka sendiri yang mencari data, seperti yang kita lakukan. Kita datang ke desa ya, minta data dari kepala desa dan seterusnya. Apakah lembaga-lembaga tadi juga mencari sendiri secara pro-aktif datanya atau apa. Karena, kalau mencari data yang pro-aktif, data yang pro-aktif saya meragukan, Pak mereka bisa mencari data di lapangan. Yang kedua, kalau data yang ada di mereka tentu mereka masih terlibat dengan KUR ataupun dengan kredit yang lain.

Sama seperti Bu Evita, saya juga mempertanyakan. Yang namanya usaha kecil itu, Pak. Mikro itu kalau dia tidak minjam ke bank, berarti kan sangat level yang benar-benar ultra mikro, Pak ya. Jadi, kalau memang dia berusaha sudah pasti dia punya pinjaman, besar kemungkinan sudah punya pinjaman. Jadi, sungguh-sungguh aneh. Tapi, supaya *double* ada keadilan, saya setuju. Tetapi juga, tolong dilihat satu *case per case*, karena agak sulit ini untuk apa namanya mematikan. Artinya, data yang kita sampaikan dengan pihak-pihak lain apakah memenuhi standar yang sama.

Lalu kemudian, tadi saya mendengar juga ada kendala dalam penyaluran, karena pembatasan sosial, orang belum bisa datang. Saya sama memperkuat apa yang disampaikan oleh Bu Evita, kenapa yang 2,4 juta itu rasanya sulit gitu. Apa nggak benar tenaga lapangan dari lapangan itu bisa datang meminta, mengantarkan atau lewat pos dokumen itu untuk ditandatangani, Pak. Ini ini kan kasihan gitu, waktu kita membantu, tapi ada hampir 30%, 20% lebih yang masih terkendala, karena tidak tidak bisa tanda tangan. Kalau itu 250 juta, 2,5 miliar sih saya masih bisa memahami, tapi 2,4 juta saya kira untuk pedagang kecil, saya kira itu masih bisa di apa namanya ditunda sampai pencairan sepanjang datanya dianggap valid untuk apa namanya mempercepat dana itu sampai kepada mereka.

Lalu kemudian, bentar ini saya minta perhatiannya Pak apa namanya daerah seperti daerah pemilihan saya Pak, di Kalimantan Utara, daerah perbatasan dan pedalaman. Itu mohon perhatiannya. Karena, kebanyakan daerah perbatasan itu, Pak selama ini menggantungkan untuk sumber-sumber mereka itu dari Malaysia. Itu semua sekarang perbatasan Malaysia

ditutup sudah setahun. Bayangkan mereka beli barang dari Indonesia 2,4 juta, Pak untuk bayar *speedboard* aja nggak cukup, Pak.

Untuk mereka ngambil uang ke bank aja yang 2,4 juta, sewa perahunya 5 juta, Pak. Ini kalau masih dipersulit, saya bingung. Jadi, kalau bisa ya pemerintah daerah diminta mengantarkan ke mereka atau secara kolektif atau lewat kepala desa atau apa. Karena, biaya mereka untuk mengambil dana yang cuman 2,4 juta itu lebih besar daripada dana yang mereka akhirnya terima.

Kemudian yang terakhir, saya kira yang saya ingin tanyakan. Ini dari program untuk 2021, ini yang apa namanya arah fokus program, Pak. Saya melihat cuman bidang kewirausahaan yang secara kuantitatif menyebutkan saya tapi tidak apa namanya tujuannya tidak disebut juga, ini hanya menyebut peningkatan rasio kewirausahaan saat ini 3,47%. Mau jadi berapa targetnya tahun ini, Pak? Sama juga yang lain, bidang perkoperasian, bidang usaha mikro dan UMKM. Mungkin, tidak detail disini.

Mungkin, bisa tertulis nanti, Pak disampaikan kepada kita ya. Terwujudnya koperasi modern itu dari berapa keberapa? Berapa yang kita harapkan koperasi itu akan menjadi modern di tahun 2022, ya akhir Desember 2021 kita akan mendapatkan laporan dari kementerian, berapa yang terwujud koperasi modern itu, berapa UMK yang naik kelas, dan seberapa besar peningkatan kontribusi ekspor yang dalam bentuk angka, Pak kuantitatif, supaya kita bisa berdiskusi di masa yang akan datang, apa kendalanya. Sehingga, angka itu tidak tercapai.

Lalu, bagaimana kita bisa mencari solusi supaya itu bisa tercapai. Nah, di sini kan, misalnya pengembangan model bisnis itu kan nggak apa namanya masih sangat umum. Tentu, saya memahami presentasinya tidak mungkin detail ya. Tapi, tolong Pak dengan angka-angka yang apa namanya yang kita bisa menjadi kesepakatan bersama, sehingga kita bisa evaluasi untuk tahun anggaran berikutnya.

KETUA RAPAT:

Oke, Pak Deddy.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Masih banyak nih.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Kenapa?

KETUA RAPAT:

Masih banyak lagi yang mau tanya, kita mau rapur.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Loh, kan saya sudah bilang tadi yang terakhir, nggak sabar jadi. Ya, saya sudah bilang tadi yang terakhir, Pimpinan ya. Kalau perlu kita pakai *stopwatch* aja semua. Supaya sama-sama benar-benar tepat waktu.

Saya kira itu aja, Pak Menteri. Mohon supaya kita tahun depan lebih enak lagi dan selanjutnya lebih enak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke, makasih.

Masih dari virtual Pak Edhie Baskoro Yudhoyono, Pak Ibas.

F-PD (EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc.):

Baik, Terima kasih, Pimpinan Pak Martin.

Yang saya hormati Pak Menteri Koperasi dan UMKM,

Bapak Ibu Anggota DPR yang terhormat,

Kita fokus aja. Kita bicara kebijakan keuangan negara Pak melalui sektor UMKM. Hutang kita sudah tinggi, pertumbuhan masih rendah dan *spending* sudah tinggi tetapi ternyata eksekusi belum sepenuhnya sesuai, begitulah. Namun, tetap kita apresiasi dari Kemenkop dalam semangat untuk membantu UMKM di masa pandemi ini.

Meskipun, sosialisasi dan informasi program sudah banyak dilakukan, tetapi tetap masih ada sejumlah pertanyaan dan kendala yang ditemui para pendaftar. Daftar tinggal daftar, tapi hasil belum tentu berhasil. Nah, ingat Pak UMKM itu adalah penyokong, pertumbuhan ekonomi nasional dan itu penting. Kita bicara *survival mode* dulu, baru kita bicara *sustainable mode*, setelah itu barulah kita bicara tentang bagaimana kita *ekspan* dan melakukan inovasi-inovasi dalam UMKM, begitulah semestinya. Baru bisa kita bilang UMKM kita naik kelas. Nah, alih-alih seperti itu kok tidak semuanya cair program Banpres produktif usaha mikro, BPUM.

Saya tahu sekali bahwa jumlah UMKM di Indonesia itu kalau dirata-rata di setiap daerah mungkin dihuni 80% dan 12 juta itu bukan angka yang kecil, tapi kalau dikatakan kurang pasti akan kurang. Sementara itu, anggaran belanja dari Kementerian UMKM sudah sisa 28 triliun. Syarat-syarat yang kami lakukan di daerah sebenarnya juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kementerian dan jangan sampai ada istilah, Pak. Alamat bantu saat bangkrut atau bantu sebelum bangkrut UMKM kita ini. Ini apresiasi Dapil, Pak. Banyak juga yang sedang menunggu, yang sedang mengharapkan dari

pengharapan Kementerian Koperasi UMKM. Tidak hanya di tanah karesidenan pawitandirogo, tapi mungkin di seluruh tanah air kita.

Jadi tolong, sekali lagi saya ingin menegaskan perhatikan nasib *wong cilik*, rakyat kecil kita 2,4 juta bagi mereka yang berusaha ultra mikro sangat berarti dan sehingga kalau UMKM kita dibantu, ekonomi kita bangkit, *Insha Allah* rakyat Indonesia kita tersenyum.

Sekian dari saya, Pak. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, makasih Pak Ibas. Kita lanjut ke sayap kiri, Bu Nevi Zuairina.

F-PKS (Hj. NEVI ZUARIANA):

Iya, Pak Martin makasih atas waktunya.

Dan Anggota Dewan Komisi VI yang kami hormati,

Pak Menteri dan jajarannya,

Di masa pandemi yang telah berlangsung setahun ini, menurut data Kemenkop banyak UMKM merasa terbantu dan bangkit kembali dengan bantuan BPUM dan tapi program ini kan sebetulnya bagi-bagi uang Pak ya ke masyarakat, sebetulnya bagus untuk mereka mendapatkan modal kembali. Terus, bagaimana pengawasan pelaksanaan untuk BPUM ini juga harus diperhatikan agar masyarakat juga bijak menggunakannya. Kalau saya sosialisasi dengan masyarakat, saya sampaikan mereka tidak boleh beli macam-macam. Mereka harus diberikan barangnya dengan modal kembali, sehingga mereka berusaha kembali dan terus juga sebaiknya program ini disinergikan dengan program Kemenkop, Pak. Ya, jadi tidak *tok* kita sebar-sebar uang saja, tapi kalau bisa di tahun 2021 ini sinergikan dengan program dari kementerian. Itu yang pertama, Pak.

Lalu yang kedua, dari laporan evaluasi BPUM 2020, ada 44,8% UMKM kapasitas kinerja meningkat, serta 51,5% UMKM usahanya kembali beroperasi. Tolong sampaikan indikator dari 2 *output* ini, Pak. Menurut saya, ini penting dijelaskan agar pemahaman kita sama, Pak. Jangan sampai BPUM ini sudah dianggarkan, tapi tidak ada hal yang apa namanya hanya *ceremony* saja, Pak. Jadi, kita kasih uang udah lepas gitu, kita maunya ada kelanjutannya.

Lalu yang ketiga, ada 12 juta penerima BPUM 2020. Tolong jelaskan bagaimana pemerintah memverifikasi akurasi dari data penerima bantuan tersebut. Dari laporan di lapangan bahwa awal-awal program ini kisaran Agustus-September calon penerima mendapat SMS pemberitahuan kalau dia dapat BPUM dan dari mana sumber data pemerintah dan kapan terakhir kali diperbarui. Karena, tidak sedikit temuan di lapangan kalau penerima bantuan banyaknya mereset. Jangan sampai karena kita ingin cepat realisasi anggaran, tapi akhirnya yang penerimanya itu orangnya itu-itu juga, Pak. Jadi, nggak merata. Kadang yang katanya dari BRI, Pak datanya terus yang

pernah pinjem ke BRI dimasukin datanya. Padahal, kita kan maunya yang betul-betul dia tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, itu yang kita prioritaskan. Karena, banyak lagi pelaku UMKM yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Lalu Pak yang keempat, selain dari BPUM tersebut apakah eksekusi program Kemenkop lainnya masih sesuai dengan rencana yang, sesuai rencana atau terjadi perubahan. Kita tentu ingin agar anggaran BPUM yang besar ini berkualitas nanti program ini ke depan.

Terus terakhir, Pak. Di masa pandemi kita banyak transaksi bisnis dalam jaringan atau daring. Tentu akan semakin meningkat dan massif. Tolong sampaikan progres dari program Kemenkop dalam edukasi UMKM agar semakin familiar dengan marketing berbasis digital melalui berbagai *platform* nya. Kalau saya lihat di tahun 2021, inovasi program itu belum ada, Pak. Ya, ini yang kita ajar kepada pelaku UMKM untuk transaksi bisnis.

Makasih, Pak Menteri, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Makasih, Bu Nevi.

Lanjut masih sayap kiri, Bu Elly Rachmat Yasin.

F-PPP (ELLY RACHMAT YASIN):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yang saya hormati Pimpinan beserta seluruh jajaran Anggota Komisi VI, Bapak Menteri Koperasi beserta jajaran.

Saya langsung saja. Tentunya, saya sangat mengapresiasi Kemenkop UKM yang telah berhasil menyalurkan BPUM senilai 12 triliun kepada 12 juta UMKM yang tentunya ini sangat bermanfaat. Namun, salah satu titik kritis penyaluran Banpres kepada usaha mikro ini adalah ketersediaan data tentang usaha mikro. Kami minta penjelasan bagaimana Kemenkop UKM menghimpun data usaha mikro dan menjamin tidak adanya data fiktif, sehingga penyaluran Banpres bisa tersebut bisa tepat sasaran. Karena, memang banyak terjadi di lapangan. Mereka yang memang benar-bener berusaha tidak mendapatkan dan mereka yang katanya baru dadakan mendaftar saja itu yang mendapatkan. Jadi, ini perlu ada perlu ada apa tindak lanjutnya. Sehingga, untuk ke depannya tidak ada lagi data-data fiktif.

Untuk permasalahan di lapangan, mungkin hampir sama yang semua dirasakan kepada kami sebagai anggota untuk konstituen juga, terutama adalah permasalahan mereka yang *bankable* ya yang sudah mempunyai hutang di bank, itu yang jadi permasalahan utama. Karena, mereka sebenarnya orang yang sangat terdampak. Mereka kehilangan pekerjaan dan harus membayar hutang kepada bank.

Jadi, itu sebenarnya yang harus mendapatkan prioritas, tapi yang ini kemarin mereka tidak mendapatkan bantuan karena punya hutang di bank. Ini permasalahan ini dirasakan sama oleh teman-teman kita tadi disampaikan oleh Bu Evita, disampaikan oleh Pak Deddy, itu keluhan-keluhan mereka kepada kita. Termasuk juga saya ada di lapangan itu kemarin pada saat 2 hari mereka sudah mendapatkan kabar mendapatkan bantuan ini cair, itu yang mendapatkan bantuannya meninggal begitu ya.

Sehingga, coba saya sudah di kepada ahli waris dengan surat keterangan dari RT atau RW setempat kalau memang mendapatkan bantuan itu saat ini meninggal dua hari yang lalu gitu. Tapi ternyata, begitu mereka ke BRI itu pun ditolak gitu ya. Jadi, tidak tidak boleh. Mungkin, hal-hal seperti ini yang perlu mendapatkan evaluasi. Apakah hal ini memang tidak bisa gitu ya. Jadi, harus ada pertimbangan-pertimbangan kembali termasuk juga untuk tahun 2021 ini. Apakah yang mendapatkan kemarin yang belum mendapatkan bisa mendaftar lagi, harus mendaftar atau secara otomatis mereka sudah terdaftar di tidak perlu mendaftar lagi. Ya, mungkin karena hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan masyarakat bertanya banyak bertanya kepada kami dan kami juga perlu mendapatkan penjelasan yang pasti dari Kementerian Koperasi.

Mungkin itu saja, terima kasih.

Billahi Taufik Wal Hidayah,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, makasih Bu Elly. Kita ke kanan, Bu Sondang Tampubolon.

F-PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON):

Terima kasih.

Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi VI yang saya hormati,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Syalom,

Salam damai sejahtera untuk kita semua,

Om swastiastu,

Salam kebajikan,

Para Menteri Koperasi dan UMKM, Pak Teten beserta seluruh jajaran Kemenkop UKM yang saya hormati.

Terima kasih atas paparan yang sudah diberikan pada kami, pada siang hari ini. Kalau kita melihat dari realisasi anggaran tahun 2020, sisa anggaran hanya 0,77% itu prestasi yang luar biasa, tapi mungkin kita bisa di-break down apa sih Pak yang 0,77% karena sebelumnya kan sebetulnya anggarannya Kemenkop itu awal 972, setelah penghematan 649, tetapi di pertengahan jalan ada Banpres. Sebenarnya, itu kan bukan anggaran apa

namanya langsung kepada koperasi UMKM kalau saya tidak salah begitu. Jadi, kalau bisa di-*break down*, ini apa yang supaya untuk mengoptimisasi di anggaran tahun 2021.

Nah kemudian, saya masuk kepada rencana kegiatan dan anggaran tahun 2021. Saya membaca dan mendengarkan tadi apa yang sampaikan oleh Pak Menteri bahwa fokus program kegiatan Tahun Anggaran 2021 hampir mirip sebenarnya dengan tahun 2020. Ada bidang koperasi, bidang usaha mikro, bidang UKM, bidang kewirausahaan dan ini program-program yang bagus-bagus semua, Pak. Kami sangat berharap apabila ini dijalankan dengan sangat baik, ini akan bisa meningkatkan bagaimana kualitas dari perkoperasian kita dan juga bagaimana meningkatkan atau mewujudkan UMKM untuk naik kelas.

Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah di sini di bidang perkoperasian ada namanya yang pertama programnya pengembangan model bisnis koperasi dan fasilitas pemanfaatan teknologi melalui digitalisasi koperasi, misalnya contoh. Nah, saya nggak tahu apakah di tahun 2020 ini ada. Kami nggak tahu apakah ini realisasinya seperti apa, karena memang secara jujur kami di sini memiliki apa namanya konsituen banyak Pak, koperasi-koperasi. Kalaupun kami dilibatkan dalam program-program ini, ini akan sangat membantu daripada Kementerian Koperasi UMKM dalam menjalankan program-program ini.

Karena, kita sama-sama harus mengawal yang namanya perbaikan-perbaikan koperasi serta UMKM. Di sini, sadar saya melihat pengembangan SDM UMKM, kemudian peningkatan wirausaha dan lain sebagainya. Nah, kami berharap di sini kami punya punya apa namanya konsitituen banyak, Pak yang koperasi dan mereka aspirasinya adalah bagaimana kami koperasi ini bisa levelnya bisa lebih baik lagi. Kami butuh peningkatan apa namanya pengembangan model bisnis seperti ini. Ini apabila dilibatkan akan sangat sinergi gitu.

Nah, kenapa saya sampaikan ini. Terus terang di tahun 2020 ini aspirasi kami Pak sebagai Anggota DPRRI. Setelah Covid, itu ada banyak beberapa program-program yang diluncurkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, itu kami tahunya dari media sosial, Pak. Nah, alangkah baiknya kalau ada terjalin komunikasi yang jauh lebih baik lagi. Seperti misalnya contoh, apa namanya program kalau di DKI itu ada warung-warung gratis ya, warteg gratis dulu kalau nggak salah. Nah, itu kami tahunya dari mana Pak, dari media sosial. Nah, alangkah baiknya kalau dikomunikasikan dengan baik apalagi DKI yang saat itu pertama kali penyebaran Covid 19-nya, itu akan apa namanya program itu masih bisa, akan lebih-lebih terkomunikasi dengan baik. Karena, banyak yang bertanya kepada kami, Bu ini programnya apa ada warung gratis untuk pekerja sektor informal. Ya, kami tidak bisa jawab di sana, begitu. Nah, itu yang berikutnya.

Nah kemudian, poin berikutnya lagi adalah setelah tadi program-program yang mungkin bisa disinergikan kepada kami untuk membantu program dari apa namanya Kementerian Koperasi dan UMKM pasca kemarin Undang-Undang Cipta Kerja ada di sana sektor koperasi. Saya ada beberapa ayat dan pasal. Kami ingin menanyakan bagaimana tindak lanjut dari pada rancangan, kan harus ada turunan, rancangan RPP-nya, RPP-nya seperti apa

dan kemudian yang terakhir sama seperti teman-teman yang lain mengenai bantuan pres.

Banpres ini Pak yang 2,4 juta per UMKM, ini kalau melihat tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Anung bersama dengan Bu Evita katanya apa namanya sulit, apa namanya SDM-nya yang mengurus sulit dalam sebagainya dan terus terang kami juga mau menyampaikan bahwa kami sulit juga berkomunikasi dengan rekan-rekan di Kementerian Koperasi dan UMKM, sangat sulit sekali. Mohon maaf ini kami harus menyampaikan di sini. Kami menyampaikan di sini adalah atas nama kepentingan rakyat bukan kepentingan kami pribadi begitu.

Nah, alangkah baiknya apakah missal, ini usulan konkrit kami. Apakah ada satu PIC yang ditunjuk khusus menangani Banpres ini agar bagaimana komunikasinya bisa lancar. Terus terang nggak mungkin. Pak tiap hari kita akan kejar misalnya Pak Anung. Kami akan menugaskan juga staf-staf kami di bawah yang untuk mem-*follow up* dan sebagainya agar bagaimana ini secara teknis aja, tapi kan sebenarnya ya teknis-teknis kayak begini apa namanya kalau ada PIC yang ditunjuk dan lain sebagainya akan lebih mudah.

Jadi mungkin itu, kami berharap apa namanya kinerja Kementerian Koperasi UMKM yang sudah bagus di atas kertas ini bisa terlaksana dan terwujud demi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita yang saat ini jauh lebih ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke, saya tidak mau membatasi. Tapi, kita mau rapat paripurna. Jadi, saya ingatkan sekali lagi. Pak Rafli.

F-PKS (RAFLI):

Terima kasih, Ketua.

Terima kasih, Pak Menteri dan jajarannya.

Saya ingin menyampaikan bahwa program ini diapresiasi oleh rakyat. Mereka berterima kasih, tinggal lagi bagaimana memberikan kemudahan-kemudahan untuk masyarakat bahwa program bantuan presiden ini, yang BPUM. Ini sangat berdampak sekali. Jadi, 28 triliun, saya kira hari ini kita kasih 100 triliun, ya udah besok kita kasih 100 triliun ya buat rakyat ya, kita sepakat ya. Jangan tanggung-tanggung. Kalau perlu lebih dari situ. Itu satu hal penting. Jadi, ini berdampak sekali. Jadi, merasa masyarakat merasa ini.

Kemudian, ada kendala-kendala yang disampaikan teman-teman ini menjadi catatan. Ayo kita evaluasi program ini, apa program ini benar-benar bisa menjadi program yang benar-benar produktif dan beradaptasi dengan kondisi pandemi. Kemudian disamping itu, kita juga harus berpikir alternatif-alternatif lain begitu, alternatif lain. Jadi, bagaimana dalam situasi seperti ini, di dalam suatu daerah itu mampu mensuplai ataupun minimal mampu, mampu memberikan kebutuhan-kebutuhan di daerah itu sendiri. Bagaimana

produktif daerah itu sendiri produktif, minimal itu. Nah, ini dia. Ini penting sekali menurut saya.

Saya nggak panjang-panjang. Itu saja. Jadi, harapan saya ke depan ya, program ini ditambah aja. Kita buat. Mudah-mudahan situasinya baik, tapi kalau untuk Indonesia saya pikir 2-3 tahun ke depan bolehlah bantuan-bantuan seperti ini diperbesar saja. Biar rakyat lebih banyak menerimanya.

Kemudian, ada satu hal lagi. Barangkali ini ingin saya sampaikan. Ada aspirasi dari daerah. Saya akan langsung berikan ke Bapak. Aspirasi ini untuk membangun pabrik es, karena ikan di Aceh itu banyak sekali. Jadi, jangan sampai dibuang ke laut. Ikan sudah ditangkap, dibuang ke laut. Nggak ada pabrik es dan segala macam. Ini koperasi juga. Satu hal saya ingin sampaikan juga, ini komunikasi harus enak nih. Nggak banyak kok, Kementerian Koperasi itu cuman berkomunikasi dengan 50 orang Anggota DPRRI Komisi VI, yang lain nggak ada. Jadi, jangan ini. Kita harus kooperatif. Ya kan, kita perbaiki niat untuk semangat baru. Oke ya, saut ya semua.

Marilah mari mulai dengan semangat baru.

ANGGOTA:

Hoi Hoi!

F-PKS (RAFLI):

Ah, nggak kompak. Sekali lagi.

ANGGOTA:

Coba Pak Herman, Pak Herman.

F-PKS (RAFLI):

Sekali lagi, Pak Ded.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Dug dug dug, siap. Ya ya ya.

F-PKS (RAFLI):

Marilah mari mulailah dengan semangat baru.

ANGGOTA:

Hoi hoi.

F-PKS (RAFLI):

Oke.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Oke, masih panjang.

Jadi, kita singkat-singkat, kita selesaikanlah ini. Karena, kita harus nanti juga. Pak Menteri jam 1.15 saya harapkan semua pertanyaan bisa selesai. Jadi, kita pergunakan waktu sebaik-baiknya. Kita lanjut ke virtual. Sudah lama nongkrong itu Pak Herman. Pak Herman Khaeron.

F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Baik, terima kasih Pak Martin. Saya masuk jam 10.30 tadi.

Yang saya hormati Pak Menteri beserta seluruh jajaran,

Pak Teten mudah-mudahan sehat selau semuanya, dan

Yang saya hormati Pak para Pimpinan, dan

Seluruh Anggota. Nggak Nampak disini, dan

Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam rapat dengan Kementerian UKM pada hari ini.

Pertama, tentu memberikan apresiasi terhadap serapan anggaran yang sangat tinggi dan hampir menyentuh 100%. Semestinya membuat rekor baru, Pak Teten bisa 100% ya. Meski tentu juga anggarannya sangat kecil, karena UMKM yang tentu memiliki tanggung jawab besar terhadap memajukan sektor ekonomi dan sudah terbukti menjadi jangkar perekonomian nasional dan bisa bertahan pada situasi krisis, kecuali di Covid ini. Semestinya memang ada anggaran afirmatif yang jauh lebih besar kepada Kementerian Koperasi. Sehingga, betul-betul bahwa perwujudan dari ekonomi Pancasila, ini dapat tergambar, terpotret di dalam anggaran Kementerian Koperasi dan UMKM. Apalagi terhadap anggaran tahun 2021 dari 978 kemudian turun menjadi 890. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat untuk terus membangun perekonomian rakyat yang sesungguhnya sudah sangat diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kedua, terhadap pembagian anggaran tersebut saya kira mohon dipertimbangkan, Pak Teten kalau nanti BPUM ini ada kembali, diperbesar terhadap anggaran pelatihan. Karena, sebuah cita-cita besar tentu kalau saya baca di presentasinya, Pak Teten bahwa ke depan ingin meningkatkan kelas dari usaha koperasi dan UMKM ini menjadi usaha-usaha yang tentu itu skalanya meningkat. Tetapi kalau, kami melihat gambaran pembagian anggaran yang memang sudah kecil apalagi program kewirausahaan dan koperasi hanya 625 Miliar, ini juga harus ada cara lain bagaimana memberikan dorongan melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia maupun teknologi dan akses terhadap permodalan serta akses terhadap teknologi yang tentu ini bisa dijalankan oleh Pak Teten dan kawan-kawan di Kementerian.

Yang ketiga, karena saya diminta singkat oleh Pak Ketua. Terkait dengan BPUM, nah ini saya masih mensinyalir ya. Saya mensinyalir Pak Teten di lapangan, ini banyak sekali *broker-broker* yang bermain untuk mengakses terhadap anggaran yang 28 triliun 800 miliar ini ya kemarin bisa menyerap 12 juta pelaku usaha mikro dan tentu ini yang harus dibenahi pada tahun 2021 jika kemudian keinginan dari BPUM ini bisa lebih efektif, berhasil meningkatkan bahkan bisa merangsang terhadap usaha-usaha baru yang mungkin dulu usahanya berskala rumah tangga, naik ke pada skala-skala yang korporasi meskipun pada level mikro.

Nah yang kedua, selain dari banyaknya *broker-broker* yang bermain di lapangan, tentu banyaknya jenjang birokrasi ini juga menyebabkan banyaknya penyelewengan di lapangan dan saya kira saya tidak menyalahkan siapapun, tetapi tentu sebagai pelaksanaan kegiatan, kita harus antisipatif dan cara-cara antisipatif inilah seperti apa kita bisa bagaimana memperbaiki dari sistem dan mekanisme yang dilaksanakan pada tahun 2020. Jujur saja perlu saya sampaikan kepada Pak Teten. Program ini efektif untuk meningkatkan daya beli. Daya beli utamanya itu dan walaupun tidak berhasil untuk meningkatkan skala usahanya, tetapi dengan peningkatan daya beli ini justru menopang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Jadi, ada dua tujuan besar yang Pak Teten semestinya dimasukkan di dalam presentasinya untuk meyakinkan, baik itu presiden maupun pihak-pihak lain bahwa sesungguhnya BPUM selain memberikan dukungan permodalan kepada para usaha kecil mikro, tetapi pada saat yang sama memang meningkatkan daya beli dan ini yang memang sudah sebelum ada Covid, daya beli masyarakat ini sudah bermasalah.

Jadi ke depannya, BPUM bukan hanya untuk menjadi program tanggap darurat pada era Covid ini. Kalau ke depannya kemudian terus dijalankan, meskipun mungkin dalam volume yang lebih kecil. Jika kemudian nanti sudah masuk dalam era normal, vaksin sudah efektif untuk membangunkan *herd immunity*. Tentu, jangan dihilangkan ini program produktif usaha mikro ini. Karena, selain memberikan dorongan, rangsangan lahirnya usaha-usaha kecil menengah dan kecil ultra mikro kecil di daerah, juga meningkatkan daya beli di masyarakat yang pada akhirnya perekonomian akan secara otomatis bergulir di daerah tersebut. Sehingga, nanti membuat catatan-catatan pada waktu evaluasi bukan hanya kemudian bersandar kepada hasil *calling*, tetapi hasil kajian, hasil penelusuran bahwa sesungguhnya program Banpres produktif usaha mikro juga mendorong daya beli yang pada akhirnya kemudian ada roda ekonomi yang berputar. Meskipun, saya kira skalanya skala kecil, tapi secara kolektif ini menjadi skala yang lebih besar.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Nah tentu oleh karenanya memberikan apresiasi.

Iya, yang terakhir, yang terakhir sama dengan teman-teman yang lain. Saya berharap dengan adanya pergantian di Sekjen Pak Arif, Pak Arif inikan lebih telaten, lebih sabar dan kerjanya lebih fokus. Saya saya bersama-sama Beliau dulu, pada saya pimpinan Komisi II dan mudah-mudahan dengan pergantian Sekjen, Pak Arif menjadi Sekjen tentu hal-hal yang menjadi skak dengan para orang Anggota Komisi VI, komunikasinya kurang baik dapat diperbaiki dan tentu Pak Arif harus menjadi catatan penting bahwa kalau melihat diskresi kemarin tidak ada sama sekali, sama perlakuannya seperti yang lain-lain.

Bukan kami ingin diistimewakan, tetapi bahwa kami sungguh-sungguh membawa mereka itu bukan membebani, tapi justru kami menambah *power* ya, bagi yang mengkoordinasikan ya kami biyai, bagi yang usahanya bagus kan tambahi. Nah, oleh karenanya, kalau Pak Teten juga ingin berhasil di dalam rangka penyaluran berbagai bantuan, tentu kami sebagai Anggota Komisi VI juga akan meningkatkan kapasitas itu dan tentu ini semata-mata karena kemitraan kita. Mudah-mudahan semuanya bisa berhasil.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Herman.

itu di sebelah layarnya di sebelah, Pak Sonny.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Yang saya hormati Pak Menteri beserta seluruh jajaran, dan

Yang terhormat Pimpinan beserta segenap Anggota Komisi VI.

Singkat saja langsung saya, yang pertama sama dengan teman-teman yang lain. Saya mengapresiasi atas penyerapan anggaran, tapi khusus pagu yang pagu 649771350, termasuk juga mendukung penuh usulan sekitar 850 0606375. Namun dengan catatan agar arah fokus bidang perkoperasian, koperasi simpan pinjam yang selama ini ada beberapa yang secara operasionalnya mencekik rakyat, itu harus benar-benar dimonitoring, dievaluasi. Kami berharap, saya dulu juga sudah pernah melaporkan yang seperti itu ditertibkan. Banyak masyarakat kita yang bener-bener menjadi

korban dari koperasi simpan pinjam yang itu bukan padat padat anggota, tapi memang padat modal.

Yang kedua terkait dengan arah kebijakan yang digitalisasi. Karena, ini akan sangat berpengaruh bagi kita semua. Khusus mengenai yang penyerapan anggaran 12 juta, yang untuk Banpres ada beberapa catatan. Pertama, tadi menyampaikan data survei dari BRI. Menurut saya, di lapangan kok sepertinya tidak, saya enggak tahu metode surveinya seperti apa. Tapi saya memastikan bahwa 12 juta penerima itu tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri Koperasi.

Saya punya satu contoh kasus bagaimana seorang nasabah, sebut merek saja nasabah BRI tidak mengusulkan BPUM ini, tapi dia mendapatkan bantuan. Padahal, dalam peraturan Menteri Koperasi jelas syaratnya adalah pelaku usaha mikro dan ini terkonfirmasi kalau nggak salah saya baca di, saya nonton di YouTube, Pak Sunarso bahwa mereka caranya tidak seperti yang diharapkan oleh Pak Menteri. Jadi, kalau bank modelnya adalah kalau dia punya nasabah sekian, kemudian nasabah itu di filter, dicari yang tidak punya kredit, yang saldonya juga tidak lebih dari 2 juta. Ketemulah di BRI itu satu juta sekian.

Mereka tidak tahu apakah pelaku usaha mikro atau kan bukan, yang penting secara data seperti itu. Agar memenuhi syarat, kemudian para petugas bank tersebut mendatangi orang-orang itu untuk mengisi *form* dan kebetulan saya punya satu contoh kasus, di Jawa Barat tidak pernah mengajukan tiba-tiba dapat. Sementara, kami Anggota DPR meskipun bukan pengusul dari badan apa Banpres ini. Kami juga melewati sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri Koperasi. Saya melalui rumah aspirasi saya, kemudian juga menerima data-data itu, bukan hanya melakukan verifikasi data, tapi juga verifikasi faktual, kita ajukan, kita lewatkan dengan surat pengantar dari kepala dinas dan hasilnya juga tidak 100% mendapatkan ini.

Jadi saya kira, ini harus menjadi catatan. Kalau perlu, menurut saya Pak Teten, kementerian bisa melakukan evaluasi terhadap, misalkan bank penyalur atau lembaga-lembaga pengusul yang tidak dalam yang periode pertama kemarin tidak menjalankan sesuai dengan persyaratan termasuk tadi yang beberapa teman menyampaikan koperasi-koperasi misalkan, kalau istilahnya Pak Herman tadi ada *broker-broker*. Jadi sebelum dimintakan, diurus, dipinjemin duit, begitu 2,4 cair langsung buat bayar itu. Nah, saya kira ini daripada gitu, kenapa tidak buat koperasi yang pernah saya sampaikan ke Pak Teten. Koperasi para petani, perhutanan sosial. Kita bikinkan mereka pabrik-pabrik orang, missal dalam satu contoh, duit tidak hilang. Jadi, saya setuju pada konsepsinya, tapi pada implementasinya banyak catatan yang menurut saya ya harus kita lihat dulu usulan yang 28 nanti masih seperti yang sekarang atau tidak.

KETUA RAPAT:

Oke.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Karena, kalau sisi soal persyaratan tidak mendapatkan KUR dan sebagainya, sudah cerdas semua nama yang tercantum suami, istri saja yang minta. Kenapa tidak ada syarat yang lain, misalkan pelaku usaha mikro syaratnya adalah salah satu misalkan PRT, kalau yang kemarin surat dari keterangan dari kepala desa. Ini sekaligus untuk melakukan digitalisasi, sekaligus untuk mendorong agar masyarakat punya izin usaha.

Jadi sekali lagi, saya mohon Pak Menteri bisa melakukan evaluasi terhadap lembaga-lembaga pengusul. Kami bukan soal yang kami perjuangkan tidak dapat bukan soal itu, toh kami juga melalui tahap-tahap yang ada. Tapi komunikasi, sistem yang harus dibenahi. Bayangkan saja dengan dinas koperasi di daerah juga menanyakan ke kami, "gimana, Pak perkembangannya?". Artinya, ada sistem yang salah, ada model komunikasi yang tidak sehat, yang tidak pas. Sementara program ini benar-benar ditunggu oleh masyarakat.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak elok kalau terlalu lama, karena yang di ruangan itu penuh dengan tantangan sirkulasi AC dalam masa pandemi.

Terima kasih. Pak Menteri, terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Makasih, selanjutnya Pak Khilmi.

F-P GERINDRA (KHILMI):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yang saya hormati Ketua Komisi VI beserta Anggota,

Yang saya hormati Pak Menteri beserta jajaran.

Jadi, setelah saya amati dari pertanyaan temen-temen ini. Tujuan di kementerian ini bagus untuk mengembangkan UMKM supaya lebih majulah. Tapi, setelah saya lihat kok saya baca pendataan melalui rekening BRI yang saldonya kurang dari 1 juta atau 2 juta tadi, seperti dikatakan oleh Pak Sonny tadi. Jadi, rasanya sekarang tujuan yang baik ini miris juga buat saya, gitu loh. Karena apa, saya pikir pendataan ini langsung dari Kementerian Koperasi lewat dinas-dinas koperasi yang ada di daerah, walaupun itu ada izinnnya kan gitu, tapi kalau nanti supaya UMKM itu kelihatan jadi UMKM, yang ada rekening di BRI atau BNI atau Bank Mandiri, itukan merupakan tabungan Pak, bukan merupakan rekening CV atau UD atau apa kan gitu. Ini kan enggak bisa dibuat patokan, orang ini bisa nerima atau tidak.

Padahal tujuan Bapak ini bagus loh. Saya tadi sempat ngobrol-ngobrol sama temen-temen dari koperasi. Tujuannya sangat bagus, saya malah mendukung anggaran ini lebih gede lebih besar, tetapi saya lihat loh kok penyalurannya ada caranya ya kayak begini kan takutnya ada yang salah, kita nggak menuduh, takutnya. Masalah ini kan duit yang lumayan besar, hampir 28-29 triliun. Jadi, ke depan misalnya ada stimulus dari pemerintah

untuk menggerakkan UMKM ini, harus dipikirkan caranya bagaimana. Coba, Bapak lihat kemarin yang di 2020, yang dapat uang 2,4 ini kemajuannya kayak apa. Kalau duit 2,4 ini Pak, saya rasa kalau untuk jualan bakso atau es cendol, apa gitu bisa berkembang. Tapi kalau untuk UMKM-UMKM yang ada punya industri kecil industri kecil, mungkin uang segitu ini, ya bukan anu ya, untuk menggerakkan ekonominya dia itu mungkin tidak bisa gitu loh. Apalagi 12 juta tadi data-data itu banyak yang diambil dari perbankan yang belum tentu itu adalah sektor orang UMKM.

Jadi, saya berharap saya sangat mendukung sekali program dari Kementerian UMKM ini, Pak Teten dan saya pernah mendapatkan program waktu kementerian yang lalu itu, pasar desa Pak senilai 950 juta itu sangat bermanfaat, bisa menumbuhkan hampir 60-70 UMKM di situ itu dan walaupun dia tidak dikasih modal, tapi dikasih tempat wadah untuk usaha. Ya selama ini saya cuma, selama 5 tahun dapat sekali, Bu. Jadi, saya berharap ini program-program yang bagus ini diterusin dan itu disurvei. Apakah benar orang yang telah dikasih oleh Kementerian Koperasi pasar itu bisa tumbuh. Itu saja dari saya, Pak. Jadi, saya berharap uang sebesar itu tidak hilang begitu saja. Masalahnya tujuan pemerintah itu adalah menumbuhkan ekonomi.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Khilmi. Kita ke kanan, Pak Nasim.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Terima kasih.

**Pimpinan yang kami banggakan, dan
Rekan-rekan Komisi VI yang kami banggakan,
Bapak Menteri Pak Teten, dan
Bapak Arif Rahman, dan
Deputi yang kami banggakan juga.**

Saya simpel saja kalau membahas BPUM, saya kira sudah panjang dari awal dan akhir. Yang penting bagaimana realisasi ini bisa terdata dengan baik intinya, bisa di-*cross check* kembali apa yang harus, solusi langkah terbaik itu saja yang bermanfaat.

Lalu yang kedua, saya ingin menanyakan yang pertama. Sebenarnya program Kemenkop ini, yang terpenting ini tolong dicatat, di 2020 program yang sudah berjalan ini sudah jalan semua atau belum, itu yang kami pingin laporannya, itu terpenting. Karena, saya kira hampir tidak ada apa kegiatan. Karena kan, semua kepada program PEN semua di Kementerian Koperasi ini, itu yang saya ingin tahu nanti ke depan. Lalu karena, selama ini juga koperasi kan acara-acaranya pelatihannya *online*, apa semua *online* ya kan. Nah, pasti serapan anggaranpun saya yakin mungkin bisa 90%, tapi bagaimana sebenarnya program-program di 2020. Karena, waktu itu sebelumnya kami juga pernah menyampaikan bersama teman-teman tentang program-program

yang bermanfaat dari koperasi itu dan kami lihat di 2020 tidak tampak bagi saya.

Contohnya, yang pertama program tadi yang disampaikan teman kita juga semua, Mas Tommy tadi nyampaikan, juga Pak Helmi dan teman-teman Pak Ibu Sondang sampaikan. Program yang sudah bermanfaat itu ke mana dan bagaimana, baik itu pasar desa. Itu sangat penting. Satu, catat itu Pak untuk di 2021 paling tidak. Itu perlu evaluasi kembali. Yang kedua, wirausaha pemula. Di luar program PEN mungkin ya. Wirausaha pemula yang sangat bermanfaat dan terbukti itu.

Pak Sesmen yang lalu juga teman deputi sudah tahu Pak Teten dan saya kira, saya berharap koperasi di saat ini, di bawah Pak Teten ini bisa lebih baik dari yang lalu, harus lebih bermanfaat ya kan. Soalnya, saya lihat di sini ada banyak bidang perkoperasian, usaha mikro, bidang UKM dan kewirausahaan, bidang ekspor dan lain-lain yang saya kira ini hanya wacana atau pemanfaatannya sampai sejauh mana, gitu loh. Nah, itu yang saya harapkan nanti ke depan, di 2021 ini bener-bener maksimal gitu Pak Teten, ya kan. Jadi, terbukti bagaimana kita menghidupkan koperasi kembali, koperasi ini dengan apa, usaha UMKM ini bisa maksimal, itu yang kita harapkan, simpelnya.

Jadi, saya ingin pemaparan di 2021 itu yang bermanfaat tadi tolong dimaksimalkan, di samping dengan PEN. Kalau kami lihat di sini, PEN pembahasannya memang di 28 triliun sekian ini kan pembagian persentasenya macam-macam, tidak cuma koperasi kan, ya kan. Ada BUMN ya kan, ada dinas, ada perbankan, ada koperasi sendiri yang cuma 2,45%, ada Kementerian dan Lembaga. Nah, ini saya perlu pemaparan ini, perlu prosentase ini. 12 juta usaha ini di koperasi saja gitu, Pak Teten? Atau terbagi prosentasenya dari semua ini. Nah itu, nah itu saya butuh itu saja, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Untuk ke 2021 saya jadi kesimpulan untuk dibahas kembali pemanfaatannya yang terpenting buat konsituen, buat masyarakat-masyarakat kita. Karena, kita yang tahu. Itu yang kita harapkan.

Terima kasih.

Wahllahufik Hima Wamin Tauriq,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Memang Pak Nasir nih kalau bicara berwibawa. Bu Melani.

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi VI,

Yang saya hormati Pak Menteri beserta jajarannya.

Saya hendak, singkat saja. Tentunya memberikan apresiasi atas pencapaian-pecaapaian dari Kementerian Koperasi dan UKM dan saya juga sama seperti teman-teman untuk menyinggung BPUM. Kalau di dapil saya, saya coba mengajukan untuk 700 UMKM dan sudah masuk, sudah cair 310, masih ada sisanya. Saya mau nanyakan, tapi mereka juga nggak tahu kenapa, kenapa belum cair yang sisanya sebanyak 350 dan saya mau nanyakan, karena tidak ada solusinya bagaimana dan karena itu saya mau menanyakan, untuk selanjutnya untuk program BPUM di 2021, apakah yang 350 yang belum dapat 2020 itu bisa diajukan kembali 2021 atau itu sudah tidak bisa lagi, itu itu yang saya mau tanyakan dan solusinya apa.

Kemudian, untuk juga program-program kegiatan anggaran 2021, di sini saya baca yang UK UKM terwujudnya kontribusi untuk ekspor UKM. Di sini ada fasilitas pelatihan dan pendampingan serta pengembangan kawasan UKM berbasis ekspor. Saya mau tanyakan, karena ini yang program-program dahulu itu ada untuk pelatihan dan pendampingan untuk para UKM dan wirausaha baru, tetapi bukan tentunya bukan berbasis ekspor. Apakah mereka program ini bagus sekali kemarin yang lalu-lalu diadakan, apakah bisa diadakan lagi? Karena, untuk para wirausaha baru tentunya sangat berguna dan apalagi setelah diadakan pelatihan, diberikan modal kerja juga. Saya mau menanyakan, tetapi tentunya dengan situasi pandemi ini tidak bisa bertemu, apa bisa ada program secara virtual.

Kemudian, untuk pengembangan Smesco. Bagaimana para UKM yang juga sudah dilatih oleh Kementerian Koperasi UKM untuk mendapatkan juga mereka produk-produknya bisa di pasarkan melalui Smasco. Saya nggak tahu bagaimana caranya dan mungkin nanti bisa ada apa namanya penjelasan lebih lanjut, karena sudah dibantu, sudah dilatih, sudah diberikan modal dan cara pemasarannya apakah juga bisa melalui pelayanan peningkatan aktivitas Smesco.

Itu saja, Pimpinan. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Makasih, Bu Melani. Masih ada 2 lagi, jadi saya minta kita singkat-singkat. Karena, waktu sudah habis sebenarnya. Bu Siti Mukaromah, masih ada?

F-PKB (SITI MUKAROMAH, S.Ag., M.A.P.):

Ada, siap.

KETUA RAPAT:

Oke, Bu.

F-PKB (SITI MUKAROMAH, S.Ag., M.A.P.):

Ya, siap Pak Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Yang terhormat dan Komisi VI dan seluruh Anggota Komisi VI,

Yang kami hormati Bapak Menteri Koperasi dan UMKM, Pak Teten dan juga,

Seluruh jajarannya.

Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, mudah-mudahan saya bisa menerapkan waktu dengan *simple*.

Pertama, tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi yang awal tentang apa namanya pengajuan-pengajuan yang memang hari ini di tempat saya 1.000 masih 0, karena masih itu, Pak Menteri. Jadi, dari ini juga bagian dari catatan, karena hari ini juga saya juga dikejar juga oleh mereka yang sudah terdaftar dari nama-nama tersebut.

Yang selanjutnya Pak Menteri, bahwa selama ini kita itu, UMKM itu menggunakan definisi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. Apakah tidak sebaiknya kita melakukan, definisi tersebut kita perbaharui bersama. Karena, sudah lebih dari 12 tahun dan tentu perlu dipertimbangkan bahwa studi mengenai UMKM itu tentunya perlu adanya perhitungan inflasi, kemudian juga terjadi perkembangan UMKM seperti kenaikan omset, kemudian jumlah tenaga kerja yang makin efisien dan juga hari ini tentu perlu diperbaharui.

Apalagi hari ini banyak pelaku UMKM yang menggunakan model *online*. Saya pikir ini juga harus menjadi bagian dari yang dipikirkan oleh kita bersama-sama. Kemudian juga, hari ini sulit bersaing dengan UMKM negara pesaing, ketika dengan undang-undang yang ada hari ini. Kita punya omset lebih dari 51 miliar. Ini sudah dianggap sebagai UMKM dan sudah tidak dianggap sebagai UKM dan sudah tidak bisa memperoleh dukungan dari Kementerian Koperasi dan UMKM.

Padahal, di Vietnam Bapak, batasan UMKM itu mencapai angka 270 miliar dan Malaysia 90 miliar. Dengan kata lain, kalau usaha Indonesia ini beromset 51 miliar, tidak lebih dapat, tidak dapat dukungan dari pemerintah dan ini, sementara kita harus bersaing dengan UMKM yang dari Vietnam maupun dari Malaysia. Nah, saya pikir ini masih menjadi hal yang saya pikir harus jadi apa, masukkan yang harus dipertimbangkan tentang definisi dari undang-undang kita di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Selanjutnya, Pak Menteri apakah kira-kira Kementerian Koperasi itu punya sistem *database* UMKM yang lebih handal, lebih terkini, kemudian

hidup, kemudian juga bisa diperbarui berkala, karena *nature* dari UKM itu memang lebih mudah tutup, tapi juga mudah buka. Nah, mereka bisa menggunakan model usaha baru lagi yang kemudian usaha lama ditutup, kemudian dia menggunakan usaha baru lagi dan itu tentunya secara mandiri oleh pelaku UMKM ini.

Kemudian juga bagaimana agar itu terintegrasi antara kementerian maupun dengan pemerintah daerah yang *secure* tentunya akan di apa namanya disahkannya undang-undang perlindungan, rencana akan apa sahkan RUU perlindungan data pribadi, rencananya tahun ini. Ini menjadi bahwa integritas itu akan penting agar kebijakan yang terkait UKM dan 18 kementerian dan lembaga itu punya basis data yang sama, yang kemudian juga tidak tumpang tindih di kementerian dan lembaga tersebut.

KETUA RAPAT:

Oke, Bu.

F-PKB (SITI MUKAROMAH, S.Ag., M.A.P.):

Kemudian yang terakhir, Pak Menteri. Satu lagi, Bapak.

Apakah kemudian mungkin program kemitraan dan bina lingkungan BUMN itu sebaiknya dikelola agar berdampak optimal dalam penciptaan usaha besar dari UKM. Nah, artinya gini, bahwa bagaimana ada sinergitas yang tentunya dari program kemitraan yang ada di BUMN juga terkoneksi juga, sehingga ini menjadi bagian dari BUMN yang punya tadi disampaikan ada kelasnya naik dari kelas yang kecil, menengah, kemudian yang besar.

Saya pikir itu saja dari saya, Pak Menteri. Terima kasih, mudah-mudahan Menteri Koperasi, Kementerian Koperasi ke depan lebih baik dan apa yang disampaikan bagian dari beberapa apa aduan dari Bapak Ibu Anggota dan juga termasuk dari saya juga menjadi bagian diperhatikan agar kementerian lebih baik lagi, terkomunikasi dengan kami di Komisi VI.

Terima kasih.

Wallahufik Aqwamith Tariq.

Walaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Lanjut, Pak Nyat Kadir masih ada? Pak Nyat?

F-P. NASDEM (Drs. NYAT KADIR):

Ada ada ada, Ketua

KETUA RAPAT:

Udah sehat?

F-P. NASDEM (Drs. NYAT KADIR):

Alhamdulillah, sehat.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak.

Tapi, sebentar ya Pak Nyat ya, udah mau paripurna ini.

F-P. NASDEM (Drs. NYAT KADIR):

Iya ini, jadi saya kan hanya satu pertanyaan saja, Pak Menteri. Hallo.

KETUA RAPAT:

Iya, Pak. Kita dengar, kita dengar.

F-P. NASDEM (Drs. NYAT KADIR):

Saya hanya ada satu pertanyaan saja. Saya kira kalau apa namanya Banpres ini, pasti lah bermanfaat yang pertama untuk meningkatkan daya beli. Seperti kata Pak Herman, cuma ini sudah ditanyakan teman-teman ini ya, maka saya persingkat saja. Dari segi manfaat, asas manfaat yang lain itu ya, untuk meningkatkan usaha dia itu. Bagaimana mengevaluasinya ini, Pak Menteri? Bagaimana mengevaluasi. Jangan sampai ini untuk tadi kan ada yang mengatakan ini berhasil meningkatkan, itu mungkin satu orang, ini 12 juta orang itu beragam beragam gaya kan, beragam niat pula.

Bagaimana mengevaluasinya itu? Nah, mungkin tidak sekarang Pak, karena baru kan ya, Pak Menteri ya, kan baru itu dibagi itu kan baru dibagi itu kan baru beberapa bulan, 2-3 bulan saja, kan susah juga kita mengevaluasinya mungkin tahun depan itu. Daya manfaat untuk mengembangkan usaha di menteri itu. Bagaimana cara mengevaluasi, pertanggungjawabannya bagaimana. Ini kan dana hibah?

Saya kira begitu saja, Ketua. Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak Nyat sehat-sehat.

Iya, Pak Mahfud satu menit ya, Pak Mahfudz *mic*-nya belum hidup. Oke.

F-PKS (H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S. Sos.):

Ya siap Pak Martin.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI,

Yang saya hormati Menteri Koperasi UKM beserta jajarannya, dan

Semua Anggota Komisi VI yang mengikuti rapat pada kesempatan hari ini.

Saya nggak-nggak banyak Pak Martin, hanya mau menyampaikan aspirasi dari masyarakat terkait dengan pengelolaan koperasi yang dianggap atau diduga menyimpang. Penyimpangan terjadi dalam konteks pengelolaan dan juga dalam konteks penggunaan keuangan. Nah, koperasi ini bernama koperumnas yang berdomisili di Jakarta Timur, yang bergerak di bidang atau di dunia perumahan skala peta sih ini bersifat berskala apa nasional, anggotanya juga cukup banyak dan mereka para anggotanya ini mengalami keresahan, terus bertemu dengan saya dan kasus ini juga sudah disampaikan ke dinas koperasi di DKI, tapi menurut dugaan mereka seperti ada oknum yang bermain, tidak di *followup* secara baik.

Nah, atas dasar ini kemudian juga sudah dilaporkan ke Kementerian Koperasi ke pusat, ketemu Pak Zabadi kalau nggak salah, kepala mereka. Tetapi juga, belum mendapat apa respon atau penanganan yang memadai dan hal yang ingin saya sampaikan adalah ini akan, situasi koperasi ini akan menjadi satu potensi ancaman yang besar, yang seperti juga dialami oleh banyak koperasi yang selama ini terjadi. Seperti koperasi yang mengelola umroh yang belum lama ini juga, yang angkanya triliunan, kemudian koperasi-koperasi yang lainnya.

Saya hanya ingin mengatakan kepada Pak Menteri beserta jajarannya bahwa koperasi ini kan sesungguhnya masuk dalam pilihan bisnis yang punya legenda sebagai soko guru ekonomi Indonesia. Dari dulu sudah ada sampai sekarang, tapi perilakunya tuh memang banyak yang menyimpang. Artinya juga, seringkali banyak penipu yang kemudian atau perilaku penipuan yang berselimut dibalik kelembagaan koperasi ini, kan gitu.

Menurut saya, ya sebaiknya di samping pembinaan yang sudah dilakukan, pengawasan terhadap perilaku koperasi itu harus dilakukan secara betul-betul apa mendalam, profesional dan juga harus ditindak jika ada apa namanya oknum-oknum atau petugas-petugas yang memang ada bermain dalam konteks ini. Sebetulnya, terlalu banyak peristiwa kejadian yang terjadi dalam penyimpangan koperasi.

Itu aja, Pak Martin ya. Mudah-mudahan pada koperasi ini. Komprumnas ini segera diatasi sebelum terjadi apa-apa pada anggotanya yang sudah besar. Terima kasih, Pak Martin.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak Mahfudz. Jadi, waktu terbatas, saya tutup sudah untuk Anggota. Sekarang ke Pimpinan, Pak Demmer.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Saya sedikit aja, Pak.

Teman-teman Komisi yang saya hormati.

Pertama, saya ingin tahu nanti perkembangan tentang *artificial intelligent, big data* Bapak, Pak. *Big data* Bapak yang dari berapa 18 kementerian itu, Pak. Mohon itu menjadi catatan dalam raker, ratas Bapak di kabinet nanti, untuk meminta data di masing-masing kementerian yang menjadi binaan, apa binaan wirausahanya dan seberapa banyak, terus kemudian beberapa disalurkan. Karena, sekarang kita udah canggih, sudah *artificial intelligent*, sudah mudah untuk menyatukan, untuk mencari padanannya dan sebagainya.

Kemudian, saya juga mungkin di ratas juga disampaikan bahwa Banpres ini sangat bermanfaat, karena di samping memang untuk meningkatkan konsumsi. Artinya, tentu kalau konsumsi meningkat, pertumbuhan bisa diatasi kan begitu, Pak. Jadi, ketimbang bansos, Pak yang pada akhirnya ada korupsinya, terus nanti menerimanya berkerumun dan sebagainya, ini Banpres ini kelihatannya jauh lebih efisien, efektif dalam kondisi ini.

Artinya apa Pak, mereka tidak hanya karena dapat bansos, kalau dapat bansos kan sudah pasti dia tidak jadi pengusaha, Pak. *Let's say* kita bilang yang Banpres ini timbul dunia usahanya, timbul 10% aja. Itu sudah sangat bagus dan itu sangat memungkinkan dalam pandemi ini, karena banyak usaha-usaha baru yang muncul dalam pandemi ini. Apalagi kalau kita tahu bahwa sekarang ini gojek yang begitu sangat laris gitu, usaha-usaha rumahan banyak sekali muncul, Pak. Nah ini, mungkin ini yang menjadi *trigger* Bapak untuk bicara kepada presiden pada waktu saat di bicarakan tentang pemberdayaan atau meningkatkan atau mempertahankan pertumbuhan.

Yang kedua yang ketiga, mungkin saya minta, karena Bali ini terus terang, ya mungkin dari daerah wisata Bapak tahu. Dua kali, dua kali lipat penurunannya, minus-nya dua kali lipat dari nasional itu. Nah, sehingga ini menjadi konsen juga Pak untuk apa perbaharui, apalagi kalau kita bicara vaksin ini bisa tahun depan, 2 tahun lagi belum bahkan ada yang bicara 3 tahun lagi baru selesai vaksin ini. Jadi, saya minta konsen itu 1 tentang *big data* Bapak Itu dipertanyakan lagi, sehingga nanti Bapak menjadi benar-benar Bapak sesuai dengan tujuan Kementerian ini dibangun pertamanya Pak, yaitu membangun UKM yang tadinya UKMnya itu ada di mana-mana gitu.

Jadi sekarang, Bapak minta itu ke presiden dan Banpres ini adalah salah satunya. Mungkin alasan Bapak untuk meminta itu dan percaya ke Pak Presiden bilang percayakan itu kepada kami, karena di Banpres ini akan menjadi dunia usaha baru, minimum kira-kira mungkin bisa 20%, bisa 30% kita nggak tahu. Emang bansos itu. Ya Pak ya, itu saya minta dan 3 saja, Pak. Jadi, sama yang Bali pertumbuhannya agak berat, mohon bantuannya.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Dammer.

Sekarang, saya juga mau sampaikan paling terakhir Pak, tapi singkat ada 4 hal, Pak Menteri.

Pertama, ini hasil dari kunjungan kerja Komisi VI di Kawasan Danau Toba. Pada waktu itu kita menjadwalkan memang untuk sebenarnya bersama-sama dengan jajaran Kementerian Koperasi dan UKM untuk meninjau UMKM di sana, tapi karena ada persoalan teknis terkait protokol kesehatan, kemudian tidak bisa kita laksanakan bersama-sama.

Nah, di sana itu Pak saya rasa sekarang pengembangannya lumayan pesat dan juga kebetulan pada waktu itu kami bersama juga dengan Kementerian BUMN, itu ada fasilitas-fasilitas yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku usaha baik mikro maupun KM gitu, kecil dan menengah di kawasan Danau Toba. Nah, karena itu sebenarnya, dari Kementerian Koperasi dan UKM ini kalau bisa jemput bola ke sana untuk bisa kita kerjasamakan dengan fasilitas-fasilitas yang sekarang dibangun ini agar pelaku KM di sana itu bisa mendapatkan *show case* gitu. Jadi, kalau kita kemarin tinjau itu mereka ke apa namanya tuh bengkel kerajinan dan segala macam, tapi tidak memiliki tempat untuk menjual barang-barang dagangannya. Nah, ini mungkin bisa ditindaklanjuti Pak dan kita juga *more than happy* untuk menjembatani kepada jajaran BUMN jadi supaya bisa dijemput bola oleh kementerian.

Nah, kedua yang kami temui juga terkait dengan sertifikasi halal nih, Pak. Jadi, daripada kita sibuk ribut soal istilah wisata halal, saya waktu itu tekankan juga ya kita kerjakan saja apa yang sebenarnya diperlukan. Kalau itu persoalannya makanan ya kita kita bantu untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal, misalnya seperti itu. Kalau dia terkait fasilitas peribadahan seperti mushola, ya dibangun saja di mushola tanpa usah, tidak perlu ribut-ribut soal istilah. Nah yang terkait dengan ini, saya rasa sertifikasi halal apakah bisa ada bantuan dari dari Kementerian Koperasi untuk menolong gitu pelaku-pelaku usaha di sana untuk bisa. Karena sebenarnya, rumah makan yang halal itu banyak sekali, tapi mungkin tidak ter apa tersistem, tidak terbantu sehingga orang tidak mengetahui bahwa di sana itu sebenarnya sangat mudah untuk memperoleh produk-produk halal.

Nah, yang dua terakhir nih Pak, tidak terkait dengan dapil saya. Saya ingatkan kembali, tadi sudah disinggung oleh Pak Dammer juga soal *big data*. Ini mumpung Bapak, Pak Menteri dan jajaran sedang meng-*push* ini apa, BPUM ini jangan lupa juga untuk kita melakukan terus-menerus peningkatan data kita, Pak. Karena, itu akan bermanfaat kedepannya. Nah karena itu, mungkin perlu diterangkan kepada kita bagaimana langkah-langkah dilakukan oleh kementerian untuk menghimpun *big data* ini kalau perlu anggarannya seperti apa dan apa yang bisa kami bantu juga supaya momentum Bapak 12 juta tambah 12 juta berarti 24 juta pelaku UKM yang, eh pelaku usaha mikro ini Pak ya, yang sekarang ditayangkan oleh kementerian ini bisa benar-benar tidak lewat gitu momentumnya untuk kita mendapatkan data.

Juga yang keempat, tadi saya setuju dengan Pak Mahfudz, tapi saya lebih *general*. Pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam, Pak. Ini kan masih terus banyak terjadi permasalahan dan saya rasa, kemarin kami ketemu dengan Kementerian BUMN, misalnya. Kementerian BUMN juga meminta artinya supaya kita membahas revisi Undang-Undang BUMN,

misalnya. Lalu dengan KP KPPU meminta supaya kita revisi undang-undang persaingan usaha tidak sehat. Nah, kalau memang hambatan dari Kementerian Koperasi untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku koperasi ini utamanya Kospin ini memang di Undang-Undangnya, tapi Pak Menteri belum pernah gitu untuk meminta kepada kami supaya kita juga melakukan perbaikan gitu.

Karena, saya rasa ini juga terkait dengan kewenangan Kementerian Koperasi yang sangat terbatas untuk bisa melakukan pengawasan bahkan kalau perlu sebenarnya ada semacam lembaga penjamin dari koperasi simpan pinjam. Ini jumlahnya sudah semakin fantastis, Pak yang kasus-kasus ini. Tidak lagi puluhan miliar gitu ya, tapi udah sampai triliun gitu. Nah ini, saya rasa perlu di-address oleh Kementerian Koperasi, kalau memang kita harus perbaiki undang-undangnya ayo, masih ada waktu itu 2021 ini bisa, 2022 ini bisa. Supaya kami menaruhnya di prolegnas.

Saya rasa itu Pak Menteri dari saya 4 hal itu. Sekarang saya persilakan, cukuplah dari kita ya, supaya kita bisa paripurna.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Dikit lagi, Pimpinan.

Yang *big data* ini sebenarnya kan saya minta dari dulu tuh. Saya udah hampir 8 tahun, Pak minta untuk gabungan yang dari departemen-departemen ini di Menteri Keuangan, di Badan Anggaran. Saya minta hampir 8 tahun meminta ini terus itu. Sekarang kalau data saja gimana gitu, Pak. Coba diajak diajak ngomong di ratas. Kalau nggak kewenangannya ke sini, datanya dulu deh ke sini gitu. Udah tapah pertamanya gitu loh, Pak. Ya, Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, saya silakan Pak Menteri menggunakan kesempatan ini untuk bisa menjawab yang paling tidak yang penting-penting dan yang nanti detail bisa dijawab secara tertulis.

Silakan, Pak.

MENTERI KOPERASI DAN UKM:

Baik, Pak Martin dan Pimpinan, Pak Dammer.

Bapak Ibu sekalian Anggota Komisi VI DPRRI yang kami hormati, kami muliakan.

Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas koreksi, saran, kritik dan usulan-usulan terhadap program-program Kementerian Koperasi termasuk juga usulan penyempurnaan Banpres produktif yang kita sama-sama yakini sangat bermanfaat dan masih sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro saat ini di tengah pandemi Covid bahkan mungkin ke depan. Karena model seperti ini, saya kira semakin nyata. Tetapi, kami berkepentingan memang juga untuk menyempurnakan sistemnya, supaya ini lebih mudah dan tepat sasaran.

Nah, yang pertama yang berkaitan dengan, secara garis besar mungkin saya ingin menyampaikan, memang kami juga sudah ada arahan dari Pak Presiden agar Kementerian Koperasi ini ditinjau kembali program dan anggarannya. Nah, kami bersama Kementerian Bappenas sekarang sudah melakukan langkah-langkah yang cukup maju ya dan memang nanti harus ada perubahan-perubahan di level Kementeriannya, Pak.

Jadi, Pak Presiden saya kira ingin agar penguatan ekonomi rakyat, UMKM dan koperasi itu betul-betul mendapatkan pembiayaan yang memadai, ya baik itu program di kementeriannya, termasuk akses pembiayaan kepada perbankan. Harus diakui, saat ini UMKM akses ke pembiayaan perbankan itu baru 20%. Kalau kita bandingkan negara lain Korea, Jepang antara 70 sampai 80%. Padahal, *share* terhadap PDB itu 60%. Nah, kita harus mencari tahu kenapa akses itu masih rendah, ya ini ada kaitan juga memang dengan kebijakan di perbankan, tapi juga ada kaitan juga dengan kapasitas usahanya ya yang memang ini kita harus benahi.

Nah, tahun ini juga tahun implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, kami dengan struktur yang baru, yang sekarang kita tahu Pak Dammer, Pak Martin, Bapak Ibu sekalian koordinasi di pemerintahan ini kan lemah termasuk di kementerian. Antar deputi itu juga nggak mudah. Nah, kami sekarang coba konsolidasi dalam kementerian yang, dalam deputi-deputi yang lebih fokus dan terintegrasi satu sama lain. Sehingga, akan lebih *output*-nya, *outcome*-nya perubahannya akan lebih kelihatan.

Jadi, nanti yang urusan mikro, misalnya akan lebih fokus kita lihat nanti hasilnya. Jadi, seluruh intervensi, program, pendampingan, pembiayaan, *output*-nya kelihatan tidak, koperasi juga khusus. Usaha mikro termasuk kecil menengah dan lain sebagainya. Nah, kalau kemarin dipecah antar deputi, sehingga kita tidak memiliki tanggung jawab siapa nih yang dorong naik kelas, ini dan lain sebagainya. Nah sekarang, dengan struktur baru meskipun lebih ramping, tapi lebih terintegrasi. Sehingga nanti, *output*-nya akan lebih kelihatan nyata, tanggungjawabnya lebih kelihatan.

Nah, terkait dengan *big data*. Ini akan menjadi prioritas kita yang pertama, karena di Undang-Undang Cipta Kerja, data tunggal UMKM itu ada di kementerian kami. Nah, ini tentu kita harus dalam waktu dekat, kita sudah menyiapkan kajian untuk pengadaan infrastruktur.

Jadi nanti, kalau infrastrukturnya sudah bagus, saya kira data tunggal itu pasti kita akan punya. Dengan itu, nanti kita akan lebih jelas dengan data yang sangat jelas, kita dalam perencanaan program, pengembangan UMKM termasuk evaluasi akan lebih mudah jika seluruh program ini akan, akan akan lebih baik lah. Di undang-undang, kita nanti. Ini ada kaitannya dengan saya kira dengan banyak pertanyaan, karena nanti kita akan lebih konkretlah, misalnya yang memperoleh NIB, Nomor Induk Berusaha, dari transformasi dari informal ke formal, ini kami target sendiri bukan berdasarkan mereka mengajukan target.

Jadi, Bapak Ibu sekalian juga mungkin bisa, Bapak Ibu sekalian sebagai Anggota Dewan tahu persis di lapangan, di dapilnya mana yang harus kita targetkan dari informal ke formal. Jadi, NIB, sertifikasi, akses kepada perbankan dan lain sebagainya kita urus semua, targetkan. Yang

memperoleh sertifikasi halal, izin edar, kita akan targetkan Pak nanti. Jadi, bukan berdasarkan pengajuan. Jadi, kami sudah perintahkan, sudah rapat di kementerian. Kita yang jemput bola, kita yang mentarget. Berapa yang harus masuk NIB, berapa yang dari yang *unbankable* masuk ke *bankable*, berapa yang dapat sertifikasi halal, SNI dan berapa yang dapat izin edar yang sulit. Kita urus lah. Nah dari situ, nanti kami mohon masukan dari. Karena, saya kira Bapak Ibu sekalian lebih tahu.

Nah, karena itu maka, koordinasi sinergi dengan BSN, dengan KPPU, dengan BPOM, ini dengan sendirinya karena kami yang jemput bola, kami yang mentarget, kami yang akan proaktif untuk melakukan koordinasi.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Mau tanya, Pak Menteri. Targetnya kapan nih, Pak Menteri? Soalnya dari tadi akan, akan, akan. Terealisasinya kira-kira kapan, Pak?

MENTERI KOPERASI DAN UKM:

Ini kan kami harus ada anggarannya dulu, Ibu. Jadi, kami dengan Bappenas, semua pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan harus dianggarkan dulu. Misalnya, untuk subsidi halal, sertifikasi halal. Kami tahun ini nggak ada anggarannya.

Jadi, kita anggarkan tahun ini semua, segera tahun 22 sudah jalan. Tapi, *big data* saya kira sudah ada tahun ini. Tahun ini sudah mulai, Pak. Kami dan nanti.

Ya. Baru untuk infrastruktur ya, saya kira 16 miliaran. Saya kira Pak Arif punya pengalaman kerja sama dengan ITB waktu di KPU, untuk membuat sistem ya.

F-P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Itu mohon maaf, Pak Menteri itu *big data* UMKM ya, Pimpinan.

MENTERI KOPERASI DAN UKM:

UMKM, UMKM.

F-P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Pokoknya intinya, Bapak Menteri kami dukung langkah-langkah Pak Menteri.

MENTERI KOPERASI DAN UKM:

Jadi, tadi terakhir saya jawab secara umum saja. Usul-usulan dari Bapak Ibu sekalian memang sudah kami bicarakan dalam perencanaan anggaran

dan program baru bersama Bappenas sesuai dengan arah Pak Presiden Cipta Kerja.

Nah, yang berkaitan dengan BPUM tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian dalam evaluasi kami juga kami temukan. Jadi, kami akan evaluasi sistemnya, pengusulnya, penyalurnya termasuk kemudahan-kemudahan. Cuma memang, ini kan program PEN bukan hanya BPUM. Jadi yang BPUM itu khusus yang memang yang belum *unbankable*, yang sudah terhubung ke pembiayaan itu masuk ke program restrukturisasi. Jadi subsidi kredit, subsidi apa bunga, itu sudah masuk di situ.

Nah jadi, saya kira nanti mungkin komunikasi dari kami dengan Komisi VI akan lebih diperbaiki. Nanti, Pak Edi Satria yang akan mengurus berikutnya.

KETUA RAPAT:

Baik.

MENTERI KOPERASI DAN UKM:

Nah, saya kira dengan Pak Arif tandem, saya kira Pak Arif pengalaman komunikasi dengan.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Pak Menteri, nyela dikit. Untuk bunga 3% itu berlaku untuk pemohon baru apa yang berjalan?

MENTERI KOPERASI DAN UKM:

Baru dan berjalan. Nanti saya laporkan ke Kemenko, ada tahun ini ditambah jadi 250 triliun untuk KUR bukan 190 lagi dengan bunga 3%.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Pimpinan, kalau bisa yang mungkin ada yang nanti pertanyaan-pertanyaan nanti setelah jam 2, nanti Pak Teten masih di sini, sebentarlah 15 menit ada temen-temen ada yang mau bertanya pribadi nih.

Jadi, kita langsung ke kesimpulan ya.

KETUA RAPAT:

Ya, yang penting rapat kita tutup dulu.

MENTERI KOPERASI DAN UKM:

Nanti gini aja, mungkin. Ya, jadi tadi koperasi pengawasan kami sudah benahi. Jadi, nanti hal-hal lain nanti kami akan jawab secara tertulis dan teknis.

Itu saja mungkin. Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Menteri. Terima kasih.

Kita ini dulu kesimpulan. Ya, draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPRRI dengan Menteri Koperasi dan UKM masa sidang III, tahun sidang 2020-2021. Kamis, 21 Januari 2021.

1. Komisi VI DPRRI mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM per 31 Desember 2020 sebesar Rp29.247.222.697.834,- atau sebesar 99,23% dari pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp29.474.605.608.

Setuju, Pak Menteri?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi VI DPRRI menerima penjelasan pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan surat. Sesuai dengan surat Menteri Keuangan S30MK02 2021 tentang *refocusing* dan realokasi belanja kementerian lembaga Tahun Anggaran 2021 untuk melakukan penghematan. Realokasi anggaran sebesar Rp88.228.724.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp978.289.099.000,- Sehingga, pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2021 menjadi sebesar Rp890.060.375.000.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi VI DPRRI mendukung usulan Kementerian Koperasi dan UKM untuk melaksanakan program bantuan produktif usaha mikro, BPUM, bantuan Presiden itu, Banpres tuh. Itu singkatannya salah tuh. Bantuan Presiden, Banpres produktif ya produktif, Banpres produktif usaha mikro tahun 2021 sebesar 28 triliun 800 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi 12 juta pelaku usaha mikro dengan perbaikan sistem pelayanan agar lebih tepat sasaran.

Setuju ya? Setuju kan.

(RAPAT: SETUJU)

Lebih tepatnya itu. Lebih mudah, ya boleh. Agar lebih mudah dan tepat sasaran. Oke, sepakat ya.

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi VI DPRRI meminta Kementerian Koperasi UKM untuk merealisasikan pelaksanaan anggaran secara transparan, tepat sasaran

dan tepat guna sesuai dengan prinsip *good governance* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(RAPAT: SETUJU)

5. Kementrian 6, eh Kementerian 6.

Komisi VI DPRRI mendorong kepada Kementerian Koperasi dan UKM agar melakukan sinergitas/kolaborasi dengan instansi atau lembaga terkait untuk memberi arahan dan kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha menengah, menengah ke bawah.

Usaha menengah kecil dan mikro gitu aja, menengah ke bawah. Ya kan, Pak Menteri gitu istilahnya. Usaha menengah, iya itu menengah yang di depan hapus. Oke ulang.

Memberi arahan dan kebijakan yang berpihak kepada pelaku mikro, kecil dan menengah dalam menghadapi dampak pandemi Covid 19.

Setuju lah ini. Setuju, Pak Menteri ya. Sinergi.

(RAPAT: SETUJU)

6. Komisi VI DPRRI memberikan waktu kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPRRI.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Pertanyaan yang tertulis sudah dicatat semua kan. Oke.

Baik, tanpa mengurangi rasa hormat. Saya rasa kita bisa mengakhiri dengan kita sepakati kesimpulan pada hari ini. Maka, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Menteri Koperasi UKM beserta jajaran dan juga Bapak Ibu Anggota Komisi VI DPRRI.

Dengan ini rapat kami tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.56 WIB)

Jakarta, 21 Januari 2021
a.n KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si
NIP.197104071992032001